

**SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA (PERATIN)
PERSPEKTIF KETATANEGARAAN
DALAM ISLAM**
(Studi Kasus di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan
Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Pembimbing I : Drs. H.Chaidir Nasution, M. H
PembimbingII : Frenki, M. Si

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1438 H/ 2017 M
ABSTRAK**

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi memiliki arti suatu keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatannya berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada pada keputusan rakyat. Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Desa atau sebutan lain dalam pemerintahannya dipimpin oleh kepala desa. Kepala Desa adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa. Pekon adalah sebutan lain dari pemerintahan desa yang berada di Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2016 tata cara pemilihan kepala desa, pengangkatan/pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Namun dalam prakteknya pilkades yang sudah diatur oleh Undang-undang pemerintah untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar berkualitas karena bermainnya kepentingan politik, kepentingan yang ingin berebut kekuasaan ketimbang hakikat yang diinginkan oleh pilkades yaitu pemerintahan desa yang legitimate. Pekon Way Jambu Labuhan yang terletak di Kabupaten Pesisir Barat dikenal masih homogeny yang mana hanya terdapat adat lampung dan didominasi oleh agama Islam. Dalam hal ini kebudayaan dan kekeluargaan bersinggungan dengan kepentingan politik, sehingga masyarakat lupa diri akan kepentingan tersebut. Islam sendiri tidak mengatur sistem politik secara spesifik akan tetapi dalam juga totalitas ajaran Islam Al-Quran dan Hadis mengajarkan seluruh aspek kehidupan termasuk kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin.

Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yakni bagaimana sistem pemilihan kepala desa (Peratin) di Pekon Way

Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pemilihan kepala desa (Peratin) di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah ingin mengetahui bagaimana sistem pemilihan kepala desa di pekon way jambu labuhan dan bagaimana sistem pemilihan kepala desa dalam tinjauan hukum ketatanegaraan Islam.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian jenis lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang di lakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data yang ada di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat :
1). Kepala Desa dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala desa (pilkades) oleh penduduk desa. Usia minimal kepala desa adalah 25 tahun, dan ia harus berpendidikan paling rendah SLTP, dan termasuk penduduk desa setempat. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan, yang di bentuk BPD, dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. 2). Sistem pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh masyarakat di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat pemilihan Kepala Desa ditinjau dari hukum Islam dapat dibenarkan, sebab perintah pemilihan dalam Islam didasarkan pada musyawarah sistem atau model apa yang disepakati masyarakat.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung ☎ (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA
(PERATIN) PERSPEKTIF
KETATANEGARAAN DALAM ISLAM**
(Studi kasus di Pekon Way Jambu Labuhan
Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten
Pesisir Barat)

Nama Mahasiswa : **Pikri Rohman**
NPM : 1321020101
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Chaidir Nasution, M. H

NIP. 19580211986031002

Frenki, M. Si

NIP. 198003152009011002

Ketua Jurusan Siyasah

Drs. Susiadi AS., M.Sos.I

NIP.195808171993301002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung ☎ (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA(PERATIN) PERSPEKTIF KETATANEGARAAN DALAM ISLAM** (Studi Kasus di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”, disusun oleh **PIKRI ROHMAN** NPM. 1321020101 Jurusan **Siyasah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/ Tanggal : Kamis, 27 April 2017.

Ketua : **Drs.Susiadi AS., M. Sos. I**
Sekretaris : **Hendriyadi, SHI., MHI**
Penguji I : **Eko Hidayat, S. Sos., MH**
Penguji II : **Drs. Maimun, S.H., M. H**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Alamsyah, M.Ag
NIP. 197009011997031002

MOTTO

...وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.”.¹



¹Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : CV Penerbit Diponegoro 1971), h. 159

PERSEMBAHAN

Alhamdullillahirobbil' alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang maha penyayang, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, yang menuntun dan menyemangati menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Zul Karnain Dan Ayu Hanna (Alm) tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, bimbingan, motivasi dan selalu mendo'akan demi tercapainya cita-citaku.
2. Kakak- kakakku Zikri Yusuf, Sofiya Dalisma, Elya Wati, Mad Yani, dan adekku Nike Lestari yang selalu mendo'akan dan memberikan dorongan demi keberhasilanku.
3. Keponakanku tercinta Felisha Anggraini, Syifa Amanda, Dian Ingkana, Syakila Rahayu, Fatih Ar-Rasyid.
4. Sanak familiku yang selalu memberikan semangat dan menanti keberhasilanku.
5. Teman-temanku seperjuangan jurusan Siyasah angkatan 2013 yang saling memberikan motivasi.
6. Seluruh dosen yang selalu ikhlas memberikan ilmunya, semoga bermanfaat bagiku di dunia dan di akhirat.
7. Yang kubanggakan almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Pikri Rohman dilahirkan di Pekon Bandar pada Tanggal 10 Januari 1995, anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Ayah yang bernama Zul Karnain dan Ibu bernama Ayu Hanna (Alm). Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 1 Way Jambu labuhan Krui Pesisir Barat. Dilanjutkan Sekolah SMP N 02 Biha Krui Pesisir Barat lulus Tahun 2010. Dilanjutkan Sekolah SMK N 01 Krui Pesisir Barat lulus Tahun 2013.

Pada Tahun 2013 Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Jurusan Siyasah dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul : “SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA (PERATIN) PERSPEKTIF KETATANEGARAAN DALAM ISLAM (Studi Kasus di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut-Nya yang taat pada ajaran agama-Nya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari kebodohan menuju kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah SWT yaitu dengan agama Islam.

Judul Skripsi ini “SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA (PERATIN) PERSPEKTIF KETATANEGARAAN DALAM ISLAM (Studi Kasus di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Tata Negara Islam (Siyasah), pada program strata satu (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu izinkanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Drs. Susiadi AS., M.Kom.I, selaku ketua jurusan dan Frenki, M, Si selaku sekretaris Jurusan Siyasah UIN Raden Intan Lampung

4. Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M. H selaku pembimbing 1, dan Frenki, M.Si. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikiranya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepala Desa (Peratin), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Warga Masyarakat Pekon Way Jambu Labuhan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku, kakak, adik, sahabat-sahabat terima kasih atas do'a dukungan, dan semangat. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Syari'ah Angkatan 2013 Megi Ardiansyah, Rama Hakiki, Darip, Inda Areskha, Nanik Priyanti, Tiara Tamsil, Anisa Ulfa, Irda fitria, M.Aulia Rahman, Cindri Yanto, Dewi Wardah, Tyas Ayu, Pegi Hasmalina dan yang lainnya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas semangat yang telah kalian berikan.
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang ku kenal semasa hidupku.

Bandar Lampung,
Penulis

PIKRI ROHMAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
F. Metode Penelitian	6

BAB II PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM

A. Konsep Pemimpin	11
B. Kriteria dan Persyaratan Pemimpin	21
C. Dasar Hukum Pemilihan Pemimpin	33
D. Sistem Pemilihan Pemimpin	38

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA

(PERATIN) PEKON WAY JAMBU LABUHAN

A. Gambaran Umum Pekon Way Jambu Labuhan	43
B. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Desa (Peratin) Pekon Way Jambu Labuhan	47

C. Sistem Pemilihan Kepala Desa (Peratin) Pekon Way Jambu Labuhan.....	50
--	----

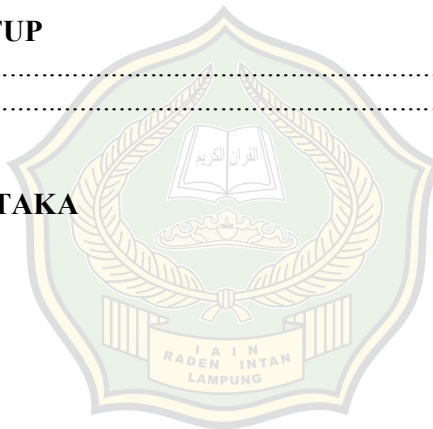
BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA (PERATIN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATA NEGARAAN ISLAM..... 55

A. Proses Pelaksanaan Kepala Desa Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	55
B. Proses Pemilihan Kepala Desa Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat ditinjau dalam Hukum Ketatanegaraan Islam	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Nama-Nama yang pernah menjabat Kepala Desa (Peratin) Pekon Way Jambu Labuhan Tahun 1950-2016	44
2. Tata Guna Tanah	44
3. Jumlah Penduduk.....	45
4. Mata Pencarian Penduduk.....	45
5. Tingkat Pendidikan Penduduk.....	45
6. Sarana dan Prasarana	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas persepsi pokok permasalahan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. Judul karya ilmiah ini adalah **“SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA (PERATIN) PERSPEKTIF KETATANEGARAAN DALAM ISLAM” (Studi Kasus di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah sebagai berikut:

Sistem adalah cara atau metode yang diatur untuk melakukan sesuatu.² atau tata cara untuk melakukan pengonsepan secara keseluruhan oleh seseorang yang akan melakukan suatu aktivitas atau kerjasama.

Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.³

Kepala Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Sebutan adatnya di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat disebut dengan “Peratin”.

²Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia* Cetakan kedua (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), h. 64

³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, cet VI (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu 1997), h.61

⁴Indonesia, *Undang- undang Desa Kelurahan dan Kecamatan* (Bandung : Fokus Media, 2014), h. 2

Peratin adalah suatu nama atau gelar pemerintahan desa dari suatu daerah masing-masing daerah yang ada di daerah tersebut, peratin sendiri diambil dari Bahasa (Lampung) yang berarti pemerintah desa.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang penulis maksud dengan judul : “SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA(PERATIN) PERSPEKTIF KETATANEGARAAN DALAM ISLAM (Studi Kasus di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”, adalah upaya untuk melihat dalam pelaksanaan sistem pemilihan kepala desa di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat kemudian ditinjau dari sudut hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Sebagai alasan yang mendorong memilih judul “Sistem Pemilihan Kepala Desa (Peratin) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)” adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Kedudukan kepala Desa sangat urgensi bagi kelancaran pemerintahan dan pembangunan Desa, oleh karena itu dibutuhkan Kepala Desa yang tepat atau layak. Selain itu, sistem pemilihan kepala Desa memiliki korelasi dengan hasil terpilihnya Kepala Desa yang tepat atau layak. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang sistem pemilihan kepala Desa di Pekon Way Jambu Labuhan.

2. Alasan Subjektif

⁵Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Edisi revisi (Bandung : CV Mandar Maju, 2014), h. 163

Permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji secara mendalam, karena adanya relevansi permasalahan tersebut dengan disiplin ilmu yang dipelajari.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem Demokrasi.⁶ Demokrasi memiliki arti suatu keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatannya berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Kekuasaan rakyat yang dimaksud sistem demokrasi adalah kekuasaan dimana rakyat berkuasa untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Pengangkatan pemimpin dalam sistem demokrasi yaitu melalui pemilihan umum.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum Pemilu yang dilaksanakan dari tingkatan atas seperti pemilihan Presiden (pemimpin negara) sampai ke tingkatan bawah seperti pemilihan kepala desa pemerintahan demokratis. Pemerintahan desa selama ini memang menarik untuk dicermati, hal itu tidak terlepas dari adanya realitas pemilihan kepala desa yang masih dianggap sebagai media yang paling efektif untuk mewujudkan demokrasi di desa karena calon pemimpin desa dipilih secara langsung oleh masyarakat desa setempat.

Desa atau sebutan lain dalam pemerintahannya dipimpin oleh kepala desa, kepala desa adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa.

⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 50

Kedudukan kepala desa adalah sebagai kepala eksekutif dalam pemerintahan Desa.⁷ Kepala desa dalam urusan pemerintahannya dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu lembaga desa yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepentingan masyarakat desa dan sebagai badan penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa kepada pemerintahan desa termasuk membentuk panitia pemilihan kepala desa jika masa pemerintahan kepala desa sudah berakhir. Desa diberbagai daerah di Indonesia terdapat banyak sebutan nama lain seperti Kepala Kampung, Desa, Tiyuh dan Peratin.

Pekon adalah nama lain dari pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2016 pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengangkatan Kepala desa sama halnya dengan desa-desa yang ada di Indonesia yaitu dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Pelaksanaan pemilihan kepala desa diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2016 Tentang tata cara pemilihan, pengangkatan/pelantikan dan pemberhentian kepala desa.

Namun dalam prakteknya pilkades yang sudah diatur oleh Undang-undang pemerintah untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar berkualitas karena bermainnya faktor-faktor kepentingan politik, kepentingan untuk ingin berebut kekuasaan ketimbang hakikat yang diinginkan oleh pilkades yaitu

⁷Koswara Kartapradja, *Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi Dan Kemendirian Rakyat* (Jakarta : PT. Candi Cipta Paramuda, 2002), h. 302

pemerintahan desa yang legitimate. Disamping itu penyelenggaraan pilkades juga tersentuh dan tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan masyarakat desa sehingga sering kali kebudayaan sangat berperan di dalamnya. Seiring dengan hal ini dalam pelaksanaan pilkades tidak jarang menuai kericuhan dan konflik. Di dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini terdapat banyak masalah dan persoalan sebagai gejala awal konflik pilkades. Yang diwarnai dengan kericuhan dan konflik yang dapat merusak keutuhan dan eksistensi masyarakatnya. Situasi seperti ini tidak jarang lagi terjadi diberbagai daerah desa yang terdapat di Tanah air Indonesia. Seperti misalnya di pekon Way Jambu Labuhan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Proses pelaksanaan pilkades di warnai dengan persaingan tidak sehat yang diakhirnya menuai konflik.

Sesuai dengan wawancara penulis kepada bapak Zul Bahri sebagai panitia pemilihan kepala desa di pekon Way Jambu Labuhan Kruai Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat tentang sistem pemilihan Kepala Desa ialah ada beberapa proses yaitu : Landasan Hukum Pilakdes, berakhirnya masa jabatan kepala desa (persiapan pemilihan kepala desa), pembentukan panitia pemilihan, penjaringan, penyaringan dan penetapan bakal calon, pencalonan kepala desa, kampanye, pemilihan kepala desa, penetapan dan pengesahan calon yang terpilih, pelantikan kepala desa yang terpilih. Persiapan dalam pemilihan kepala desa yang dilakukan panitia ialah tempat pencoblosan, pengamanan, dan tempat perhitungan suara.

Pekon Way Jambu Labuhan yang terletak di Kabupaten Pesisir Barat dikenal masih sangat homogen yang mana hanya terdapat adat lampung dan didominasi oleh Agama Islam. Dalam hal ini kebudayaan dan kekeluargaan bersinggungan dengan kepentingan politik. Sehingga masyarakat lupa diri akan pentingnya kekeluargaan dan kebudayaan demi kepentingan politik yaitu memenangkan calon mereka masing-masing dan berusaha untuk mengalahkan calon yang lain sebagai lawan

politiknya. Pemilihan kepala desa sama artinya dengan pemilihan yang akan menduduki pemerintahan di desa tersebut. Pemilihan pemimpin dalam Islam hukunya wajib, karena kita bisa bayangkan bagaimana jadinya jika dalam suatu Negara tidak ada pemimpin yang mengatur jalannya kehidupan di Negara.

Islam memang tidak ada sistem politik secara spesifik akan tetapi dalam totalitas ajaran agama Islam Al-Quran dan Hadis juga mengajarkan seluruh aspek kehidupan termasuk kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin. Islam adalah agama yang mampu menempatkan diri dalam ruang dan waktu dimana dan kapan ia berada bahkan Islam mewajibkan kepada umat muslim untuk mengangkat seorang pemimpin dalam suatu Negara yang akan mengatur kesejahteraan dan mengayomi masyarakat dalam kepemimpinannya. Pemimpin dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab diurus dunia saja akan tetapi juga bertanggung jawab diakhirat.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang pandangan Islam terhadap pemilihan kepala desa di Pekon Way Jambu Labuhan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat tersebut dan implikasinya bagi masyarakat setelah pemilihan kepala desa.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pemilihan kepala desa (Peratin) di Pekon Way Jambu Labuhan Kruki Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana pandangan hukum ketatanegaraan Islam terhadap sistem pemilihan kepala desa (Peratin) di Pekon Way Jambu Labuhan Kruki Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui sistem pemilihan kepala desa (Peratin) di PekonWay Jambu Labuhan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam dalam memilih kepala desa (Peratin) tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis sebagai sumbangan pengetahuan bagi pembaca khususnya yang terkait permasalahan dalam skripsi ini.
- b. Kegunaan praktis yaitu sebagai sumbang pemikiran terkait dengan pemilihan kepala desa (Peratin) yang tidak menyalahi posisinya dalam Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara penyelesaiannya.⁸

1. Jenis dan Sifat

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari

⁸ Wardi Bahtiar, *Metode Ilmu Dakwah* (Jakarta : Logos cet 1, 1997), h.

lokasi atau lapangan.⁹ Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dan dari buku-buku yang membahas tentang sistem pemilihan kepala desa (Peratin) dan hukum Islam, termasuk juga data primer hasil *interview* penulis dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian. Jadi, untuk mendapatkan informasi tentang sistem pemilihan Peratin (Kepala Desa) di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaan pemilihan di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat secara bebas dan terpimpin. Bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas namun masih dipimpin oleh kerangka pertanyaan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti, penelitian yang bersifat deskriptif analisis.¹⁰

Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas dan gemblang. Sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat, dan terarah.¹¹ Penulis akan menganalisis tentang Sistem Pemilihan Kepala Desa (Peratin) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat).

⁹Ahmadi Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metododologi Research* (Jakarta : Sumbangsi, 1975), h. 2

¹⁰ M. Nasir. *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), h. 63

¹¹ *Ibid.* h. 66

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti.¹² Populasi yang penulis tentukan dalam memperoleh data adalah masyarakat desa Way Jambu Labuhan yang sudah mempunyai hak pilih dalam pemilihan kepala desa yang berjumlah 842 orang.¹³

Sampel adalah contoh, representasi atau wakil dari satu populasi yang cukup besar jumlahnya.¹⁴ Tujuan penelitian mengambil sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya, dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya.

Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. *Purposive Sampling* juga disebut *judgmental sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan “penilaian” (*judgment*) penelitian mengenai siapa-siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel. Oleh karenanya agar tidak sangat objektif, penelitian harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel yang dimaksud agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian. Kriteria yang pantas dijadikan sampel pada penelitian ini adalah

a. Kepala Desa

¹²Sedarmayati, Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian* (Bandung : Mandar Maju, cet I, 2002), h. 121

¹³Monografi Desa Way Jambu Labuhan Tahun 2010

¹⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial* (Bandung : Mandar Maju, 1996), h. 148

- b. Panitia Pemilihan
- c. Tokoh Masyarakat (Agama, Adat)
- d. Warga Desa

3. Data dan Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan sumber data dari tokoh masyarakat Desa Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Penulis akan mengumpulkan literature serta dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum pemilihan kepala Desa secara umum dan Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*. Untuk mendapatkan informasi secara lengkap tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Peratin) di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, penulis melakukan

wawancara dengan pihak berikut ini: 1) masyarakat, 2) tokoh masyarakat 3) panitia pemilihan.¹⁵

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses sistem pemilihan kepala desa (Peratin) di Pekon Way Jambu Labuhan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, seperti data primer yaitu data-data yang berasal dari izin lapangan dan data-data sekunder diambil dari data-data pustaka dengan cara membaca referensi terkait.

5. Analisa Data

Data yang dianalisis secara kualitatif yaitu upaya-upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap, tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah dan tehnik untuk memuaskan keingintahuan penelitian pada suatu yuridis atau cara untuk mencari kebenaran dan memperoleh pengetahuan. Analisa data ini menggunakan instrument analisis deduktif.

Metode Deduktif, yakni analisa yang bertitik tolak dari suatu kaedah yang umum menuju suatu kaedah yang bersifat khusus. Artinya ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam nash dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis pandangan hukum Islam tentang sistem pemilihan Kepala Desa (Peratin) di Pekon Way jambu labuhan.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Lapangan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.102

Metode Induktif, yakni analisa yang bertitik tolak dari suatu kaedah yang bersifat khusus menuju suatu kaedah yang bersifat umum. Artinya ketentuan-ketentuan khusus yang ada dalam Undang-undang dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis sistem pemilihan Kepala Desa (peratin) dalam perspektif hukum Islam.¹⁶

BAB II

PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM

A. Konsep Pemimpin

Pemimpin yaitu perihal pemimpin, atau cara memimpin.¹⁷ Merupakan sebuah sistem organisasi kemasyarakatan atau kelembagaan, maka secara ideologis/ filosofis mengenai sifat-sifat dan sumber dari pemimpin dapat didasarkan pada nilai-nilai agama dan adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kata pemimpin ini berasal akar dari kata pemimpin yang berarti mengetuai atau mengepalai, memandu, melatih atau memenangkan paling banyak. Kata bendanya adalah pemimpin yaitu orang yang memimpin. Pemimpin adalah perihal memimpin, cara memimpin.¹⁸

Menurut Syiah/ Imamiyyah pemimpin memiliki istilah khusus yaitu Imamah. Konsep Imamah atau pemimpin adalah

¹⁶*Ibid.* h 43-44

¹⁷Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, Edisi kedua , 1995), , h. 769

¹⁸*Ibid.* h. 769

bagian dari hal yang penting dari aliran syiah. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara memberikan 3 basis pemimpin yaitu *ing ngarso sung tuladha*, *ing madya mangun karsa*, *tut wuri dandayani*. Yang pertama, *ing ngarso sung tuladha*, *ngarso* artinya didepan, *tuladha* maksudnya contoh. Jadi, seorang pemimpin pada top level manajemen seyogyanya memberikan contoh yang baik. Kedua, *ing madya mangun karsa*. *Madya* artinya tengah, *mangun* berarti membentuk sesuai dengan keperluan, sedang *karsa* artinya kehendak. Siapapun pemimpin itu, dia adalah middle manager artinya, jika mau berfikir dan bertindak konsisten, siapapun pemimpin itu pasti punya atasan. Dengan demikian dianjurkan untuk dapat membentuk, memperhatikan, memelihara dan menjaga kehendak dan keperluan atasan serta bawahan secara seimbang. Ketiga, *tutu wuri dandayani*. *Tut wuri* artinya dibelakang, sedangkan *handayani* artinya memberikan kekuatan. Sebagai pemimpin, harus mampu mengasuh bawahan dengan baik, bukan memanjakan tetapi justru memberikan arahan dan rasa aman.¹⁹ Maka dalam penelitian ini perihal kepemimpinan menyangkut masalah-masalah yang menjadi persyaratan, nilai-nilai idealitas dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan suksesi pemimpin tersebut.

Dalam menggali makna pemimpin atau perihal apa saja yang berkaitan dengan pemimpin ini perlu dilakukan penelitian yang mendalam atau sebuah studi khusus dengan konsep tinjauan yang berarti mempelajari dengan cermat atau meneliti dengan melakukan analisis terhadap sebuah objek.²⁰ Dalam pengertian ini pula termasuk cara menganalisis temuan-temuan penelitian dengan cara melakukan komprasi beberapa pandangan para pakar yang telah menemukan suatu konsep untuk mempertajam dan memperkuat hasil kajian. Jadi,

¹⁹Djokosantoso Moeljono, *Beyond Leadership* (Jakarta : Gramedia, 2003), h. 51

²⁰Depdikbud, *Op.Cit.* h. 1060

penelitian benar-benar dilakukan secara komprehensif dan holistik dari berbagai paradigma keilmuan yang terkait.

Studi tentang pemimpin dapat dipandang sebagai studi tentang kekuasaan dan politik. Setiap masyarakat, terbagi ke dalam dua kategori, yaitu pemimpin dan yang dipimpin. Untuk menstudi kepemimpinan struktural/birokrasi politik berarti memahami struktur, proses dan perilaku politik pemimpin.²¹ Konsep pemimpin dalam Islam didasarkan pada syura, yakni ketentuan-ketentuan yang bersumber dari wahyu ataupun hadis Nabi SAW. Salah satu dalil yang mencakup tentang terdengar di telinga kaum muslimin adalah dari Abdullah bin Amru yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ]²²

“Tidak halal bagi tiga orang yang melakukan perjalanan, kecuali mereka (bertiga) dipimpin oleh salah seorang di antara mereka”.²³

Hadis tersebut kemudian dipahami bagi urgensi sebuah pemimpin dalam berbagai hal. Kata perjalanan hanya merupakan analogi, ada yang menginteprestasi bahwa hal itu adalah perjalanan sebuah negara, sebuah organisasi, sebuah perusahaan, sebuah keluarga dan lain sebagainya, yang pada intinya setiap ada sebuah kelompok baik bersekala kecil maupun besar mesti ada seorang pemimpin yang dipilih dari bagian kelompok dimaksud. Hal ini membuktikan bahwa Islam

²¹R. Eep Saefullah Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), h. 34

²² Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Kawait, Daar Al-Qalam, 1984), h. 80

²³Dalam redaksi yang berbeda imam abu daud telah meriwayatkan dari abi sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda”*apa bila tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaknya mereka (bertiga) dipimpin oleh seorang di antara mereka*” . lihat Abdul Qaadim Zallum, *sistem pemerintahan Islam*, (Bangil : al-izzah 2002/1422), cet, vi, h. 147-148

sangat *concern* terhadap pentingnya kepemimpinan dalam segala hal.

Konsep pemimpin dalam Islam yang disandarkan kepada wahyu sebagai standar nilai bagi kepemimpinan, setidaknya merupakan karakter yang melekat pada diri pemimpin, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali-Imran 104 adalah sebagai berikut :

1. Menegakan kebenaran.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Dan hendaknya ada golongan umat diantara kaum yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh diantara yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar merekalah orang-orang yang beruntung.*²⁴ Ayat ini secara eksplisit menegaskan bahwa tugas seorang pemimpin itu adalah menegakan kebenaran dengan menyuruh bawahannya untuk berbuat baik dan mencegah mereka dari perbuatan keji dan terlarang baik menurut hukum maupun agama. Firman Allah dalam Al-Quran Aurat Al-Ankabut ayat 69 menyebutkan :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
الْمُحْسِنِينَ

²⁴ *Ibid*, h. 50

*Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhoan kami, benar-benar akan kami tunjukan kepadamereka jalan-jalan kami dan sesungguhnya kami benar-benar orang-orang yang berbuat baik.*²⁵

2. Beriman Kepada Allah, dalam hal ini firman-Nya Allah surat Muhammad ayat 7 menjanjikan :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

*Hanya orang-orang yang beriman jika kamu menolong agama Allah, maka ia akan menolongmu dan menegakan kedudukanmu.*²⁶

3. Meneladani Rasul SAW, Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 14 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

*Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (mereka) di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.*²⁷

4. Sifat-sifat pemimpin menurut wahyu ilahi adalah :
Amanah, yaitu selalu bersikap tanggung jawab dan tidak pernah mengingkari janji dan jauh dari sikap munafik. Dengan berkata bohong, tidak menepati janji, jujur dan suka berkhianat. (Qs. 26 : 107 28 : 26), *Fathonah*, yaitu harus memiliki kecerdasan, memiliki wawasan keilmuan, keterampilan memimpin, bijaksana (Qs 6 : 80) *Shidiq*,

²⁵*Ibid*, h.323

²⁶*Ibid*, h. 404

²⁷*Ibid*, h. 167

yaitu selalu bersikap benar, jujur dan dapat di percaya (Qs : 19:41,50,56), *Tablig*, yaitu memiliki kecendrungan untuk selalu mengajak, menyebarkan dan menyampaikan ajaran Islam (Qs : 42: 48).

Salah satu keputusan yang paling kurisial sebagai pemimpin adalah posisinya sebagai “panutan” dalam bahasa agama disebut sebagai *uswatun* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 21 berikut ini :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan keselamatan hari akhirat dan banyak menyebut nama Allah”.²⁸

Dalam fakta sejarah pemimpin Rasulullah diakui, baik non muslim apa lagi kalangan muslim, bahwa tiada tolak bandinganya. Ia merupakan pemimpin yang kharismatik. Karena dalam dirinya terhimpun sifat-sifat *amanah*, *sidiq*, *fathonah*, dan *tablig*. Menurut istilah Mussolini dan Hitler, pemimpin itu adalah simbol rakyat dan perjuangan mereka. Oleh karena itu seorang pemimpin harus tahu betul posisi yang diemban mereka dan karenanya harus menjaga diri dari sifat-sifat tercela.²⁹

²⁸*Ibid*, h. 333

²⁹Kedua tokoh ini (Mussolini dan Hitler), menegaskan bahwa hanya pemimpin besarlah yang dapat memahami dan meng-artikulasikan sejati para pengikutnya oleh karena itu ia harus cerdas, jujur, dan amanah. Ideologi politik mutakhir, konsep, ragam, kritik, dan masa depannya, *Ibid*, h. 310

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan masyarakat atau sebuah institusi, harus selalu dapat menentramkan masyarakat yang dipimpinnya, dengan memberikan keteladanan yang baik untuk ditiru dan dijadikan rujukan bagi kehidupan para pengikutnya. Dengan demikian, seorang pemimpin pada hakekatnya adalah teladan. Jika seorang pemimpin tidak lagi mencerminkan keteladanan, dengan ucapannya yang tidak konsisten misalnya dan tidak sesuai dengan kenyataan, selalu berubah-ubah tanpa kejelasan makna yang dimaksudkan sudah pasti yang terjadi adalah pembalikan.

Pemimpin berada pada posisi yang menentukan terhadap perjalanan sebuah negara Islam. Apabila sebuah Negara memiliki seorang pemimpin yang prima, produktif, dan cakap dalam pengembangan dan pembangkitan daya juang dan kreativitas amaliyah, maka dapat dipastikan perjalanan umatnya akan mencapai titik keberhasilan. Dan sebaliknya, jika suatu negara dipimpin oleh orang yang memiliki banyak kelemahan, baik dalam keilmuan, manajerial, maupun dalam hal pemahaman dan nilai tanggung jawab, serta lebih mengutamakan hawa nafsunya dalam pengambilan keputusan dan tindakan, maka dapat dipastikan, bangunan umat akan mengalami kemunduran, dan bahkan mengalami kehancuran.³⁰ Hal ini telah disampaikan dalam Qs. Al-Isra ayat 16 :

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا
الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

“Dan jika hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di

³⁰Dino Patti Djalal, *Harus Bisa! Seni Memimpin Ala SYB (Red & White Publishing, 2008)*, h.1

*negeri itu (supaya menaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan didalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya ”.*³¹

Islam memandang bahwa pemimpin memiliki posisi yang sangat strategis dalam terwujudnya masyarakat yang berada dalam *Baldatun Thoyyibatun wa Rabbun Ghafur* (Qs. Saba ayat 15), yaitu masyarakat Islami yang dalam sistem kehidupannya menerapkan prinsip-prinsip Islam. Begitu pentingnya pemimpin atau imam dalam sebuah jamaah atau kelompok, Rasulullah bersabda :

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ³²

“Jika tiga orang dari kalian melakukan safar (perjalanan) hendaknya mengangkat salah satunya menjadi amir (pemimpin perjalanan).” (HR Abu Dawud).³³

Kita lihat dari sejarah Islam, ketika Rasulullah SAW. Wafat maka para sahabat segera mengadakan musyawarah untuk menentukan seorang khalifah. Hingga jenazah Rasulullah pun harus tertunda penguburannya selama tiga hari. Para sahabat ketika itu lebih mementingkan terpilihnya pemimpin pengganti Rasulullah, karena kekhawatiran akan terjadinya ikhtilaf (perpecahan) dikalangan umat muslim kala itu. Terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama setelah Rasulullah Saw wafat.

Memandang sedemikian urgensinya seorang kepala negara, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa 60 tahun dipimpin

³¹ *Ibid*, h. 225

³² Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Op, Cit*, h. 80

³³ *Ibid*, h.80

oleh pemimpin yang durhaka itu lebih baik dari pada sehari tanpa seorang pemimpin.³⁴

Manusia menurut Al-Ghazali dibagi menjadi dua golongan. Dalam karyanya *al-tibr al-masbuk fi nasihat al-muluk*, Al-Ghazali berpandangan bahwa Allah telah membagi manusia ke dalam dua golongan: *pertama*, Nabi yang bertugas membimbing kepada hamba-hamba Allah menuju jalan yang benar dan yang akan membawa kebahagiaan dunia serta akhirat; dan *kedua*, para raja dengan tugas menjaga agar hamba-hamba Tuhan tidak saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Dengan kearipannya mengembangkan kesejahteraan mereka, dan memandu kearah kedudukan yang terhormat.³⁵ Kemaslahatan umat manusia di bumi sangat terkait erat dengan keberadaan dua golongan tersebut. Dengan kekuasaan yang mereka miliki, Allah menempatkan mereka pada posisi yang paling terhormat.

Al-Ghazali juga berpendapat bahwa manusia itu mahluk sosial, ia tidak dapat hidup sendiri yang disebabkan oleh dua faktor: *pertama*, kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup manusia. Hal itu hanya mungkin pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta keluarga; *kedua*, saling membantu penyediaan bahan makanan, pakaian dan pendidikan anak. Pergaulan pasti akan mengakibatkan lahirnya anak, dan tidak mungkin seseorang secara sendirian menjaga anak sekaligus mencukupi kebutuhan yang lain. Manusia tidak akan mampu mengerjakan sawah atau ladangnya dengan sempurna, dia memerlukan alat pertanian, yang untuk pengadaanya memerlukan pandai besian tukang kayu. Untuk penyediaan makanan dibutuhkan penggiling gandum dan pembuat roti. Demi keselamatan dan keamanannya diperlukan rumah yang

³⁴Ibnu Taimiyah, *Majmu'at al-Fatawa*, (Jakarta, Terjemahan), h. 455

³⁵Al-Ghazali, *At-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk* (Beirut: Ibn Zaidun, 1987), h. 49

kokoh untuk menjaga dari gangguan dan serangan dari luar. Untuk itu semua diperlukan kerja sama dan saling membantu antar sesama manusia disanalah lahir negara karena dorongan bersama.³⁶

Ali-Syariati dalam pandangannya tentang pemimpin negara di dalam bukunya *Ummah dan imamah*, terlebih dahulu menjelaskan konsep ummah, yang disajikan dengan sudut pandang sosiologis dan kemuadain mengarah pada kebutuhan akan imamah dalam gerakannya menuju kesempurnaan. Kata *ummah* diambil dari kata *amma*, yang berarti menuju dan berniat. Ini terdiri dari tiga arti : gerakan, tujuan dan ketetapan kesadaran. Dan karena *amma* pada dasarnya mencakup makna kemajuan (*taqaddum*), maka makna ini juga tersusun dari empat arti: 1) ikhtiar, 2) gerakan, 3) kemajuan, 4) tujuan. Dengan menjaga makna tersebut, kata “*ummah*” tetap pada akar dari arti “jalan yang lurus”, artinya sekelompok manusia yang bermaksud menuju “jalan”.³⁷

Menurut Syari’ati kata “*ummah*” mempunyai keistimewaan dibandingkan kata *nation*, kaum, kabilah, *syab* (rakyat).³⁸ Menurutnya kata yang paling mengena untuk menyebutkan kelompok manusia adalah kabilah, yang berarti kesamaan umat manusia dalam kiblat dan tujuan. Sedangkan ummah mempunyai kelebihan dibandingkan kabilah, kelebihannya seperti yang diungkapkan oleh Syari’ati sebagai berikut :

³⁶Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, “Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta : Universitas Indonesia, 2000), h. 75

³⁷Ali-Syariati, M. Faishol Hasanuddin, *Ummah dan Imammah*, penerjemah (Jakarta : yapi, 1990), h. 3

³⁸Ali-Syariati membagi pengertian masyarakat ke dalam 10 bentuk, termasuk di dalamnya ummah yang mempunyai keistimewaan di banding dengan pengertian yang lain. Untuk lebih jelas tentang pembagian dan penjelasannya lihat Ali-Syariati, *Ummah dan Imammah*, *Ibid*, h. 32-34

“Sesungguhnya ummah seperti kabilah, menjadikan kesamaan kiblah sebagai sendi ikatan kemanusiaan, kekerabatan dan maknawi yang nyata, dan sebagai alasan untuk berkumpul disuatu tempat...gerakan itu mengarah ke kiblat yang sama sebagai asas berfikir.”³⁹

Menurut Imam Al-Mawardi sesungguhnya Imam (pemimpin negara) itu diproyeksikan untuk mengambil peran dalam kenabian dalam menjaga negara dan mengatur dunia.⁴⁰ Pemberian jabatan imamah (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan. Tugas di atas pada umat adalah wajib berdasarkan *ijma'* (*consensus ulama*) kendati *Al-Asham* menyimpang dari mereka. Apakah kewajiban pengangkatan pimpinan negara itu berdasarkan akal atau syariat?

Pengangkatan pemimpin negara hukumnya wajib berdasarkan akal dan syariat. Orang-orang yang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada imam (pimpinan Negara) yang melindungi manusia dari segala bentuk ketidakadilan, memutuskan konflik dan permusuhan diantara manusia. Tanpa pemimpin manusia berada dalam kondisi *chaos*, dan menjadi manusia-manusia yang tidak diperhitungkan oleh bangsa lain. Disamping itu imam juga mengurus agama, karena kepemimpinan dikategorikan sebagai ibadah dan syariat menghendaki bahwa segala persoalan itu diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam agama.⁴¹

Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 :

³⁹ *Ibid*, h. 37

⁴⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulbhaniyah* diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath dan *Fathurrahman* (Jakarta : *Darul Falah* Fadli Basri, 2006), h. 1

⁴¹ *Ibid*, h. 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”.⁴²

Pada ayat di atas, Allah Ta’ala mewajibkan kita menaati pimpinan yang memerintah kita.

Kepemimpinan telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut syariat, sama status wajibnya kepemimpinan adalah fardu kifayah seperti jihad dan mencari ilmu. Artinya jika pemimpin telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka kepemimpinan telah gugur dari orang lain. Jadi status hukum kepemimpinan adalah fardu kifayah. Namun jika ada orang yang menjalankan tugas kepemimpinan maka harus ada dua pihak :

- a. Dewan pemilih yang bertugas memilih imam (pemimpin)

⁴²Ibid, h. 61

- b. Dewan imam (pemimpin) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin Negara.⁴³

Jabatan kepemimpinan dianggap syah dengan dua cara. Pertama, pemilihan oleh *ahlu aqdi wal Al-Hal* (parlemen). Kedua, penunjukan oleh Imam (pimpinan) sebelumnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah keanggotaan *ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen) sehingga pengangkatan pemimpin diantara mereka dianggap syah.

B. Kriteria dan Persyaratan Pemimpin

Karakter adalah watak, sifat, akhlak ataupun kepribadian yang membedakan seorang individu dengan individu yang lainnya. Atau karakter dapat dikatakan juga sebagai keadaan yang sebenarnya dari dalam diri seorang individu, yang membedakan antara dirinya dengan individu lain.

Secara umum persyaratan calon seorang pemimpin negara adalah adanya kemampuan pada diri calon seorang pemimpin untuk dapat memimpin orang lain kearah pencapaian tujuan sebuah lembaga yang dipimpinnya, serta dapat menjalin komunikasi antar individu yang dengan individu lainnya, karena sebuah institusi/ organisasi akan selalu bergerak atas dasar interaksi sosial antar manusia.

Menurut Imam Al-Haramain Al-Juwaini mensyaratkan bahwa calon pemimpin saat ini tidak harus dari golongan Quraisy atau pun dari keturunan pemimpin sebelumnya, karena syarat ini suatu masalah yang diperselisihkan. Maka tidak boleh membuat statement pasti, apa lagi masalah ini adalah lapangan Ijtihad, tidak boleh mutlak-mutlakan. Lebih lanjut menurut Ibnu

⁴³Imam Al-Mawardi, *Op. Cit*, h.12

Khaldun, bahwa mengapa Nabi Muhammad Saw mengatakan bahwa pemimpin itu harus golongan Quraisy, karena menurutnya Quraisy waktu itu merupakan golongan yang kuat, tangguh dan terkemuka, mereka memiliki solidaritas kelompok yang kokoh membuat mereka paling berwibawa untuk memelihara keutuhan dan persatuan umat Islam. Pemimpin seperti yang berasal dari golongan demikian mampu mengurus kelompoknya dengan efektif, tapi jika ada salah satu suku, kelompok atau seseorang yang bisa melebihi atau sama seperti kelompok Quraisy maka berhak pula memegang kepemimpinan. Karena bagi Ibnu Khaldun syarat tersebut hanya merupakan simbolis belaka dan hak kepemimpinan bukanlah hak monopoli Quraisy serta harus adanya persamaan hak.⁴⁴

Seorang pemimpin Negara dalam mengelola sebuah organisasi atau lembaga Negara harus memiliki jiwa kepemimpinan (*leadership*) sehingga ia mampu mempengaruhi bawahan/rakyatnya untuk bekerja dan produktif. Aktivitas lembaga atau organisasi yang dilakukan secara bersama-sama selalu membutuhkan kepemimpinan dari seorang pemimpin. Jadi, seorang pemimpin harus memperhatikan syarat-syarat kepemimpinan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

1. Kriteria Pemimpin

Mengenai kriteria pemimpin Negara ini Sidi Ritauddin dalam tulisan ilmiannya memaparkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin. Kriteria tersebut adalah :

- a. Sehat Jasmani dan Rohani, artinya memiliki energi fisik dan spiritual yang berlimpah dan keuletan dalam bekerja. Ia rela bekerja keras atas dasar pengabdian dan prinsip kebaikan,

⁴⁴Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1999), h. 254

serta loyal terhadap kemajuan lembaga yang dipimpinnya. Pemimpin yang cacat fisik dan mental akan menghancurkan organisasi atau lembaga yang dipimpinnya. Termasuk cacat mental bagi orang yang memiliki catatan hitam masa lalunya.

- b. Bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, dalam pengertian orang yang *comited* atau konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya serta menjauhi segala yang dilarangnya.⁴⁵ Artinya, ia memiliki integritas kepribadian, shaleh pribadi dan shaleh secara sosial, sehingga matang, dewasa, dan bertanggung jawab dan susila. Sebagaimana firman Allah SWT yang menegaskan : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu” (QS. An-Nisa :59)
- c. Mempunyai kemampuan untuk memikul tanggung jawab sebagaimana seorang pemimpin, kemampuan ini dapat diukur dari aspek manajeral,⁴⁶ karena manajemen memungkinkan terjadinya perpaduan semua usaha dan aktivitas yang mengarah pada tujuan istilusi / organisasi. Juga menciptakan kerjasama yang baik demi kelancaran dan efektifitas kerja, untuk mempertinggi daya guna semua sumber dan mempertinggi hasil guna,⁴⁷

⁴⁵ Kriteria ini secara implicit juga mencakup karakteristik idealistic seperti jujur, amanah, cerdas, dan tidak akan melakukan perbuatan yang tercela seperti KKN, Mo Limo (mabok, main judi, minum, madon dan maling,) dan sifat tercela yang lainnya yang berhaluan dengan ajaran agama

⁴⁶ Secara sederhana, manajemen adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain “*Management is simply getting things done through people*” G.R. Terry, *Principles of management*, Richard D. Irwin Inc, Homewood, Illinois, 1977, edisi ke-7, h. 7

⁴⁷ Manajemen ini dapat juga disebut sebagai pengendali suatu usaha ; yaitu merupakan : (1) proses pendelegasian/ pelimpahan wewenang kepada beberapa penanggung jawab dengan tugas-tugas kepemimpinan, dan (2) proses

- d. Mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu : *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan, aktualisasi), dan *Controlling* (pengawasan).⁴⁸

Mengangkat pemimpin dalam suatu perkumpulan atau organisasi masyarakat terlebih dalam sebuah Negara itu adalah wajib. Tetapi perlu diperhatikan adalah siapakah yang pantas diangkat menjadi pemimpin dalam organisasi/perkumpulan/masyarakat merupakan tanda tanya besar. Tidak sembarang orang yang patut dipilih untuk menjadi pemimpin. Dari hasil penelitian literatur, dalam masalah suksesi kriteria calon pemimpin ini, ditemukan banyak sekali nilai-nilai profektik Islami, yang melekat pada kriteria-kriteria pemimpin Negara yang baik selain telah disebutkan di atas.

Di antaranya ialah sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam, dalam artian benar-benar konsisten dan taat melaksanakan ajaran Islam, sehingga dalam kepemimpinannya ada rasa tanggung jawab moral agama yakni pertanggung jawaban kepemimpinan diakhirat kelak. Dari sinilah berpangkal apakah setelah ia menjabat akan menjadi koruptor apa tidak. Orang yang lemah keberagamanya biasanya akan cenderung melakukan praktek-praktek KKN dan susila.
- 2) Berakal dan sudah Baligh, hal ini dikarenakan dikhawatirkan orang gila dan anak kecil tidak dapat

penggerakan serta bimbingan pengendalian semua sumber daya manusia dan sumber materil dalam kegiatan mencapai sasaran organisasi. Lihat, Kartini Kartono, Op, Cit., h. 148

⁴⁸M. Sidi Ritauddin, Tulisan Ilmiah dengan judul "*Karakteristik Ulil Amri Dalam Format Etika Politik Islam Perspektif Al-Quran*" (Bandar Lampung : Jumal Tapis Vol. 1, 2005), h. 38-39

menguasai dirinya sendiri, karena tidak tahu tugas dan kewajiban. Mengangkat orang yang terlalu muda, meskipun persyaratan sudah tercukupi, namun ada ketidakrelaan dari yang lebih senior, dan pada gilirannya menjadi resentansi, bahkan krisis kepemimpinan,

- 3) Orang yang mendeka, dalam arti tidak terikat oleh baju golongan, partai atau ormas. Paling orang tersebut mampu membebaskan diri dari aliran kelompok/golongan setelah menjabat, karena ia sudah menjadi milik public yang hiterogen. Jika tidak maka ia akan terkesan melakukan KKN
- 4) Tidak Fasik. Pengertian fasik adalah orang yang keluar dari taat pada Allah SWT atau orang yang sering kali berbuat maksiat, kalau kita hubungkan dengan masa sekarang ialah orang yang sering kali melakukan tindakan korupsi dan manipulasi yang secara otomatis kepemimpinanya akan mengalami goncangan.⁴⁹

2. Persyaratan Pemimpin

Menurut Hazem berpendapat bahwa persyaratan untuk menjadi pemimpin/ imam adalah sebagai berikut :

- a) Berasal dari Quraisy
- b) Baligh
- c) Mumayyiz
- d) Laki-laki
- e) Alim
- f) Taqwa

⁴⁹ *Ibid*, h. 40

- g) Sesuai antara perintah dan perbuatanya.⁵⁰

Menurut Al-Mawardi bahwa pemimpin/ imam itu harus memiliki persyaratanya adalah :

- 1) Adil
- 2) Berilmu
- 3) Sempurna panca indra
- 4) Sempurna anggota tubuh
- 5) Memiliki keilmuan tentang Siyasah, aroiyah
- 6) Berwibawa
- 7) Nasab (Quraisy).⁵¹

Menurut Al-Juaini persyaratan untuk menjadi pemimpin/ imam itu adalah sebagai berikut :

- a) Ijtihad (Mujtahid)
- b) Dari Quraisy
- c) Merdeka
- d) Muslim
- e) Laki-laki
- f) Mengetahui tentang kemaslahatan.

Menurut Ibnu Khaldun bahwa pemimpin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Berilmu
- 4) Adil
- 5) Memiliki kemampuan

⁵⁰ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Madhal Lidirasul Al-Fiqh al-Islam* (Bairut : Dar Al-Fikr al-Arabi), h. 209

⁵¹ *Ibid*, h. 210

6) Sempurna panca indera dan anggota badan.⁵²

Menurut Imam Al-Mawardi sesungguhnya Imam (pemimpin Negara) itu diproyeksikan untuk mengambil peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.⁵³ Pemberian pejabat Imamah (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan. Tugas di atas pada umat adalah wajib berdasarkan *ijma'* (consensus ulama) kendati Al-Asham menyimpang dari mereka. Apakah kewajiban pengangkatan pemimpin Negara itu berdasarkan akal atau syariat?. Pengangkatan pemimpin Negara hukumnya wajib berdasarkan akal dan syariat.

Secara teoritis dan idaealis, Islam tidak hanya menuntut serang pemimpin negara harus cakap dalam segala sesuatunya, hal yang paling penting adalah sikap keteladanan dari seorang pemimpin terhadap bawahannya, memiliki akhlak yang baik dan sifat-sifat dasar seorang pemimpin. Konsep mengenai persyaratan kepemimpinan Negara selalu dikaitkan dengan beberapa hal penting, yang telah diwariskan melalui sifat-sifat Rasulullah yaitu :

1. Ikhlas karena Allah semata
2. Bedaya ingat, kuat, bijak, cerdas, berpengetahuan luas
3. Berperangai santun, kasih sayang, lemah lembut, dan ramah
4. Bersahabat
5. Berani dan sportif
6. Siddiq
7. Tawaddu'

⁵² Muhammad Yusuf Musa, *Pelajaran Fiqh Islam, Op.Cit*, h. 109-110

⁵³ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultoniyyah* (Jakarta : Darul Falah Basri, 2006,), h. 1

8. Pemaaf
9. Menepati Janji
10. Sabar
11. Iffah dan karam
12. War' dan zuhud
13. Adil dan jujur.⁵⁴

Dari sifat-sifat tersebut di atas dapat di dijelaskan sebagai berikut :

Pertama : Ikhlas karena Allah semata

Senantiasa mengharapakan akhirat dengan ikhlas karena Allah semata. Berarti bersih, jauh dari penyakit hati yang dapat menghancurkan amal usahanya, seperti, gila kekuasaan, cendrung pangkat dan kesabaran serta pengaruh, atau terpedaya dengan keadaan dirinya dan penyakit jiwa yang lain yang dapat merusak kepemimpinannya.

Kedua : Berdaya ingat, kuat, bijak, cerdas, berpengetahuan luas

Berdaya ingat, kuat, cerdas, bijak, berpengetahuan luas dan berpandangan jauh dan tajam, berwawasan luas, mampu menganalisis berbagai persoalan dari berbagai segi dengan cepat dan tepat menerapkan hasil analisisnya dengan baik, tidak banyak lupa, tidak lalai dan tidak mudah menyerah serta tidak gelap mata ketika meghadapi luapan perasaan dan kemarahan. Seorang pemimpin mau tidak mau akan menghadapi situasi dan suasana berbagai persoalan yang mengganggu perasaan. Karena itu ia harus berusaha menyelesaikan dengan menggunakan akal sehat dan cara yang bijak.

⁵⁴Syeh Mustafa Mansyur, *Fiqih Dakwah*, Cet 1 (Jakarta : Al F'tishom Umat , 2000), h. 410-415

Ketiga : Berperangai penyantun, kasih sayang, lemah lembut dan ramah

Berperangai penyantun, kasih sayang, lemah lembut dan ramah. Hal ini penting, karena seorang pemimpin akan berhadapan dengan berbagai tipe manusia. Diantara mereka ada hal yang jahil dan bodoh, karena itu seorang pemimpin dengan sifat santunya, berkewajiban melayani mereka dan menarik hatinya. Setidak-tidaknya mereka tidak dijadikan sebagai musuhnya.

Sehubungan dengan ini Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat : 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.⁵⁵

Keempat : Bersahabat

⁵⁵Ibid, h. 56

Sifat bersahabat perlu dimiliki oleh para pemimpin. Lawan sifat ini adalah kasar dan angker. Banyak hadis Rasulullah yang menyinggung masalah ini. Antara lain yang di riwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Aisyah, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda ;

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ⁵⁶

“ Sesungguhnya Allah itu lemah lembut dan mencintai sifat lemah lembut dan Dia memberikan sifat lemah lembut apa yang tidak diberikanya kepada orang yang bersifat kasar dan apa yang tidak di berikanya kepada orang yang lainnya.⁵⁷

Kelima : Berani dan sportif

Berani dan sportif, tidak pengecut dan tidak membabi buta. Sifat pengecut tidak membabi buta sangat membahayakan jama'ah. Keberanian, pada dasarnya, adalah ketetapan dan ketahanan hati, kepercayaan penuh kepada Allah dan tidak takut mati yang disebabkan oleh gila dunia dan takut mati. Keberanian yang utama adalah berani mengatakan yang haq dan terus terang, pandai menyimpan rahasia, mau mengakui kesalahan, menyadari keadaan dirinya dan dapat mngendalikan hawa nafsunya terutama ketika marah. Maka sifat keberanian sangat penting bagi seorang pemimpin umat.

Keenam : Siddiq

⁵⁶ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Daar Al-Qalam,Kawait, 1984), h. 82

⁵⁷Husein Bahrais, *Al Jamius Shahih Baukhari Muslim* (Surabaya : karya utama), h. 195

Siddiq, benar dalam berkata, sikap dan perbuatan, adalah sifat asasi yang harus dimiliki seorang pemimpin muslim. Sifat ini harus dijaga, terutama bagi pemimpin. Sifat Siddiq dalam kepemimpinan akan melahirkan ketentraman kepada pimpinan dan akan menebalkan kepercayaan orang banyak kepadanya. Sebaliknya sifat tidak jujur dan pendusta, meski hanya sedikit, akan menimbulkan keraguan, merongkong kepercayaan, bahkan dapat menghilangkan kepercayaan pemimpin.

Ketujuh : Tawadhu'

Tawadhu', merendahkan diri dan tidak membanggakan diri kepada manusia. Dengan adanya sifat ini seluruh hati manusia terhimpun dan terikat kepada pemimpin. Sebaliknya, keangkuhan akan menjauhkan hati manusia darinya. Sehubungan dengan ini Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asyu-Syura ayat 215 :

قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman”.⁵⁸

Kedelapan : Pemaaf

Memaafkan, menahan amarah dan berlaku ikhsan. Sifat-sifat ini perlu dimiliki oleh pemimpin karena ia selalu berhadapan dengan sikap, persoalan dan tipe manusia. Kadang-kadang ia berhadapan dengan gangguan, perbuatan tidak senonoh atau persoalan-persoalan yang

⁵⁸*Ibid*, h. 300

membangkitkan kemarahan yang datang dari anggota atau orang-orang tertentu. Setiap gangguan terhadap jama'ah selalu melalui pemimpin. Karena itu setiap pemimpin harus menghiasi dirinya dengan sifat pemaaf, menahan amarah, dan berbuat ikhsan.

Kesembilan: Menepati janji

Menepati janji dan sumpah setia. Akhlak seperti ini diperlukan oleh setiap muslim, terutama mereka yang bergerak dalam amal Islam. Lebih-lebih mereka yang menjadi pemimpin gerakan atau sebuah lembaga institusi. Akhlak ini dapat melahirkan kepercayaan dalam gerakan, tolong menolong, kemantapan dan akan membuahkan hasil yang ingin dicapai. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Fath ayat 10 :

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ فَسْوَئِهِ أَجْرًا عَظِيمًا

*Artinya : “Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar”.*⁵⁹

Kesepuluh : Sabar

⁵⁹Ibid, h. 408

Sifat lain yang harus dimiliki oleh pemimpin. Sebab kepemimpinan adalah sebuah amanah dari ummat, dimana terkadang lika-liku tampak amanah akan sulit dan penuh berbagai persoalan yang berlawanan dengan kehendak hawa nafsu. Jadi kesabaran, ketahanan dan ketabahan sangat diperlukan bagi orang-orang yang mengemban amanah dari ummat. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ

“ Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”.⁶⁰

Kesebelas : Iffah dan kiram

Iffah dan *kiram* adalah dua sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh pemimpin. Sifat ini melambangkan kesucian jiwa dan tidak mudah tunduk kepada hawa nafsu dan kecenderungan yang mengotori jiwa. Dengan sifat ini pemimpin tidak menjadi gila harta. Sebab ia menyadari, gila harta akan melemahkan tekadnya dalam menjalankan amanahnya sebagai seorang pemimpin.

Keduabelas : Wara' dan Zuhud

Wara dan Zuhud, sifat ini dapat menjauhkan seorang pemimpin dari hal-hal yang *syubhad* dan meninggalkan hal-hal yang mengandung dosa karena takut terjebak dalam kemurkaan Allah.

⁶⁰*Ibid*, h. 18

Ketigabelas : Adil dan jujur

Adil dan jujur, dua sifat ini sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Terutama kaitanya dengan kerja sama (*amal jama'i*), sebab dua sifat ini akan menjadikan anggota menjadi tenang dan sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Dengan ini pula kreativitas seorang pemimpin akan semakin maju, dan kepercayaan ummat akan bertambah yakin kepada pemimpinnya.

Pandangan Al-Quran terhadap sistem kepemimpinan desa sangatlah tegas, bahwa landasan pemilihan figur pemimpin negara yang kharismatik, ideal dan berwawasan luas adalah pemimpin yang mematuhi hukum-hukum Allah dan menaati tuntunan Rasullulah. Jika sistem pemilihan didasarkan pada sistem demokrasi (*syuro*) yang diajarkan Al-Quran, dan pemimpin yang dipilih tersebut adalah pemimpin yang benar-benar mampu, cakap dan terampil, serta integritas kepribadianya adalah Al-Quran dan sunnah Rasul, maka dapat dipastikan bahwa maslahat dan kemajuan ummat. Untuk itu karakteristik pemimpin desa yang telah digambarkan di atas dapat dijadikan acuan dalam memilih pemimpin negara serta tipe-tipe kepemimpinan desa yang baik, demi masa depan ummat yang baik pula.

C. Dasar Hukum Pemilihan Pemimpin

Pemimpin adalah orang yang dipilih oleh umat Islam untuk mengatur urusan-urusan dunia dengan ajaran agama yang diamanahkan untuk melaksanakan syariat Islam menuju kehidupan yang baik, amal shaleh dan perantara yang menyampaikan semua orang.⁶¹

⁶¹ Abdul Mufis Abdul Sattar, *Sistem Pemerintahan dalam Islam* (Jakarta : ter. Tajjudin Pogo, pustaka Ikadi, 2010), h. 4

Kepemimpinan dalam Islam, dengan demikian, didasarkan pada ketentuan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu kedua sumber tersebut, merupakan sumber dasar membentuk pemimpin yang menjadi acuan sebagai dasar hukum Islam. Berbicara tentang hukum Islam tidak dapat dilepaskan dengan acuan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

Dalam surat al-Baqarah ayat 30 Allah SWT berfirman :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا
مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّیْۤ
ۙ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana. Sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. al-Baqarah : 30).⁶²

Menurut sebagian ulama, ayat ini menunjukan tentang kekhalifahan di muka bumi yang berfungsi pemimpin terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan lingkungan.

Ayat di atas menegaskan bahwa setiap kaum muslimin diwajibkan pertama untuk menaati Allah dalam artian menjalankan semua yang diperintahkan kepada kita semua dan

⁶²Ibid, h. 6

meninggalkan apa yang dilarangnya, kedua kita harus menaati Rasulullah karena Allah telah mengutus seorang Rasul ke muka bumi ini, kemudian yang ketiga kita diwajibkan untuk taat kepada pemerintah (ulil amri) dalam arti.

Al-Quran surat An-Nur ayat 55

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي
شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : “Tuhan telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan yang sudi berbuat baik, bahwa sesungguhnya mereka akan diberi warsan kekuasaan dimuka bumi, sebagaimana yang telah pernah dibenkan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum mereka , dan akan dikokoh-teguhkan kedudukan agama mereka yang telah disukai oleh Tuhan untuk mereka. Pun akan ditukar Tuhan sesudah mereka merasa takut , menjadi aman dan sentosa. Ialah karena mereka menyembah AKU dan tidak mempersekutukan AKU dengan yang lain. Tetapi barang siapa yang ingkar sesudah itu merekalah orang-orang yang jahat”.⁶³

2. Al-Hadis

Ada beberapa hadis yang menerangkan bahwa memilih pemimpin itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin, diantaranya sebagai berikut :

Dari Abi Said, Rasulullah bersabda :

⁶³Ibid, h. 285

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ [أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ]⁶⁴

*“Apabila tiga orang pergi melakukan suatu perjalanan, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin”.*⁶⁵

Dari Abdullah ibn Amru yang bersumber dari Rasulullah saw. yang bersabda:

...وَلَا يَحِلُّ لثَلَاثَةٍ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ...⁶⁶

*....Tidak halal bagi tiga orang yang berada di bumi yang lapang kecuali mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin atas mereka. (HR Ahmad).*⁶⁷

Dari Abu Hurairah radhiallahu’anhua berkata, Rasulullah sallallahu’alaihi wa sallam bersabda:

يَمِينِهِ عَنْ وَلْيَكْفُرَ فَلْيَأْتِهَا مِنْهَا خَيْرًا غَيْرَهَا فَرَأَى يَمِينٍ عَلَى حَلْفٍ مِّنْ⁶⁸

*“Barangsiapa yang bersumpah, dan dia melihat yang lainnya itu lebih baik darinya, maka pilihlah yang lebih baik dan tebuslah sumpahnya.”*⁶⁹

Dari penuturan Umar Ibn Al-Khatthab Ra. yang berkata:

⁶⁴ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Kawait, Daar Al-Qalam, , terjemahan, 1984), *Op. Cit*, h. 80

⁶⁵ *Ibid*, h. 80

⁶⁶ *Ibid*, h. 85

⁶⁷ Kitab Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Kawait, Daar Al-Qalam, , 1984), h. 85

⁶⁸ *Ibid*, h. 86

⁶⁹ *Ibid*, h. 86

إِذَا كَانَ ثَلَاثٌ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ذَلِكَ أَمِيرٌ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁷⁰

Jika ada suatu kelompok sebanyak tiga orang hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin atas mereka. Itulah amir yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. (HR Ibn Khuzaimah dan Al-Hakim).⁷¹

Berdasarkan beberapa ayat dan hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa memilih pemimpin mayoritas ulama itu mewajibkan hukumnya, tetapi sebagian ulama menyatakan pendapat tidak wajib. Perbedaan dengan pendapat ini, terlihat pada pendapat di bawah ini

- 1) Ibnu Hazm, Ahlul sunnah, Murjiah, Syiah, dan Khawarij adalah wajib mengangkat pemimpin yang adil, yang akan menegakan hukum Allah dan sunnah Rasul-nya.
- 2) Menurut Imam Mawardi : mengangkat pemimpin bagi orang yang berkecimpungan dalam hal ini, ditengah ummat wajib berdasarkan ijma'. An Nabawi dan Ibnu Haldun juga berpendapat demikian
- 3) Mengangkat pemimpin wajib berdasarkan akal, menurut pemikiran para uqaha untuk taslim kepada pemimpin yang mencegah mereka dan kezaliman dan mendamaikan dalam perselisihan dan permusuhan
- 4) Imam Abu Hasan Al-Mawardi menjelaskan bahwa mengangkat pemimpin adalah fardu kifayah, artinya yang dituntut untuk menegakan adalah ummat semuanya, jika pemimpin belum tegak ummat selalu

⁷⁰ *Op, Cit*, h.87

⁷¹ *Op, Cit*, h. 87

dituntut kewajiban ini, mereka tidak akan terbebas dari dosa, sebelum tegaknya pemimpin dan apa bila pemimpin tidak ada, maka dosanya menjadi tanggungan ummat seluruhnya. Hal itu berarti ummat telah melakukan maksiat dan melalaikan kewajiban penting yang diperintahkan oleh Allah.⁷²

Musyawarah adalah kewajiban yang diwajibkan atas para penguasa juga rakyat, Penguasa harus bermusyawarah dalam setiap perkara pemerintahan administrasi, politik, dan pembuatan perundang-undangan, juga dalam setiap hal yang menyangkut kemaslahatan individual dan kemaslahatan umum.

Adapun yang dimaksud dengan “musyawarah” dalam istilah politik adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik. Jika hak partisipasi rakyat ini tidak ada dalam masalah-masalah hukum maka sistem hukum itu adalah sistem hukum diktatorial atau totaliter. Jika dinisbatkan kepada sistem Islam, maka kediktatorial itu diharamkan dalam agama Islam sebab bertentangan dengan aqidah dan syariat.

Ibnu Taymiyah berkata “Pemimpin tidak boleh meninggalkan musyawarah sebab Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya dengan hal ini.”⁷³

Ijma' sahabat dan tabiin. Disepakati pada saat Abu Bakar berpidato di masjid bertepatan dengan dilantikannya oleh seluruh umat Islam guna mempertegas pembaitanya yang telah dilakukan oleh para sahabat senior di Saqifah Bani Saidah. Dalam pidato pengukuhan, Abu Bakar antara lain menyatakan sebagai berikut:

⁷²Husein bin Mubsin Au Jabir. *Op.Cit.*h. 100

⁷³Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam* (Jakarta : Sinar Grafika Offset , 2005), h. 38

“Wahai sekalian manusia, siapa yang menyembah Muhammad, kini Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu kekal selamanya”. Lalu di tengah tengah pidatonya itu, Abu Bakar melontarkan pertanyaan kepada segenap hadirin, “(saudar-saudara), kini Muhammad telah wafat, tapi menurut pendapatku, tegas Abu Bakar, harus ada seorang yang melanjutkan perjuangannya. Bagaimanaa menurut saudara-saudara ? ”Tanya Abu Bakar. Lalu segenap hadirin serentak menjawab, “ Anda benar, ya, Abu Bakar”.⁷⁴

Dari jawaban ini dianggap telah terjadi konsensus mengenai kewajiban mengangkat Kepala Desa. Pandangan senada ini antara lain didukung oleh Ibn Khaldun yang mengatakan, “Mengangkat imam (kepala negara) itu merupakan kewajiban berdasarkan syariat. Karena telah ada *ijma'* sahabat dan tabi'in mengenai hal itu.” Hal ini dapat dijadikan dalil bahwa mengangkat imam (kepala negara) itu wajib hukumnya.⁷⁵

Sekelompok ulama lain berkata bahwa status wajibnya mengangkat kepala negara atau pemimpin itu berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Pasalnya, seorang pemimpin berkewajiban mengawal urusan-urusan agama meskipun akal tidak dianggap bahwa pemimpin sebagai bentuk ibadah yang akhirnya menetapkan bahwa mengangkat pemimpin itu tidak wajib. Akal hanya menetapkan bahwa setiap orang yang berakal sehat hendaknya melindungi dirinya dari bentuk kezaliman dan disharmonisasi, serta bersikap adil didalam memberikan pelayanan dan menjalin hubungan. Dengan demikian, ia dapat mengatur hal tersebut dengan akalnya sendiri dan bukn dengan akal orang lain. Hanya saja, syariat menggariskan supaya

⁷⁴ *Ibid.* h. 100

⁷⁵ *Ibid.* h. 115

menyerahkan segala persoalan kepada pihak yang berwenang didalam urusan agama.⁷⁶

D. Sistem Pemilihan Pemimpin

Persoalan pengangkatan pemimpin dalam katagori teori politik Islam dianggap persoalan yang paling mendasar. Hal ini disebabkan oleh pentingnya posisi seorang pemimpin. Bahkan menurut Al- Syah Rastani, pentingnya masalah pengangkatan pemimpin ini memicu timbulnya perpecahan dalam Islam terbagi beberapa golongan.

Sistem pengangkatan pemimpin dalam sejarah Islam, dapat dikategorikan ke dalam dua pola, yaitu : pengangkatan berdasarkan nash atau wasiat dan pengangkatan berdasarkan syura atau pemilihan. Pola *pertama*, dipegang oleh kaum syiah, sedangkan pola *kedua*, dianut oleh kelompok sunni. Menurut kelompok syiah, pemimpin harus diangkat berdasarkan nash atau wasiat, sementara menurut golongan sunni, pengangkatan pemimpin itu harus berdasarkan kepada pemilihan umat atau yang lazim disebut *syura*. Alasannya adalah *pertama*, karena tidak adanya nash yang *qoth'I* tentang siapa pengganti setelah Nabi sebagai pemimpin umat Islam. *Kedua*, karena prinsip kepemimpinan dalam Islam itu adalah *syura*.⁷⁷ Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38 :

... وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ...

“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka”

⁷⁶Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sultaniyah* (Jakarta : Qisthi Press, 2015.), hlm. 9-10

⁷⁷Musdah Mulia, *Negara Islam, Pemikiran Politik Husein Haikal* (Jakarta : PARAMADINA, 2001), h. 228

Lebih rinci Abu Zahrah dalam metode makna, menjelaskan bahwa pengangkatan pemimpin itu bisa dilakukan dengan tiga cara : *pertama*, melalui pemilihan bebas yang dilaksanakan melalui musyawarah, tanpa ada pengangkatan atau penunjukan oleh seseorang, *kedua*, pengangkatan atau penunjukan dari khalifah yang sedang berkuasa terhadap seseorang yang bukan keluarganya, *ketiga*; pengangkatan atau penunjukan oleh khalifah yang berkuasa terhadap beberapa orang, yang merupakan tokoh terkemuka dalam masyarakat untuk selanjutnya dipilih satu diantara mereka.⁷⁸

Ketiga pola kepemimpinan di atas, mengacu pada proses pengangkatan masa *Khalifaur Rasyidin*, menurut Husein Haykal, bahwa pemilihan *Khalifaur Rasyidin* itu berdeda-beda. Cara pemilihan Abu Bakar berbeda dengan cara pemilihan khalifah sesudahnya, sebelum meninggal Abu Bakar mencalonkan diri Umar bin Khatab. Kemudian pengganti berikutnya oleh Umar diserahkan kepada enam sahabat besarnya. Mereka itulah yang disertai untuk melakukan seleksi siapa diantara mereka berenam yang akan diangkat menjadi khalifah. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib, dipilih menjadi khalifah berdasarkan pemilihan bebas. Bahkan menurut Haykal, bahwa dalam Islam tidak ada sistem baku yang harus dipegangi dalam pemilihan pemimpin, namun pola pengangkatan *Khalifaur Rasyidin* dapat dijadikan rujukan Islam dalam pemilihan, sebab masa-masa setelah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai Islam, walaupun dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana umat Islam seharusnya melangsungkan pemilihan. Karena itu dalam melaksanakan pemilihan pemimpin lebih banyak menggunakan ijtihad.⁷⁹ Seperti dikemukakan oleh Al-Hilli (1250-1325) dan kalangan sunni, seperti Al-Mawardi (975-1059) Al-Juwaini

⁷⁸ *Ibid*, h. 229

⁷⁹ *Ibid*, h. 230

(1028-1085) dan Ibnu Khaldun (1322-1406).⁸⁰ Mereka sepakat bahwa pemilihan pemimpin bisa dilaksanakan dengan tidak harus perwakilan, namun kembali menurut Haykal, bahwa pemilihan pemimpin tidak harus dilaksanakan dengan cara perwakilan, menurutnya semua umat Islam berhak memilih pemimpin mereka. Alasannya, semua orang Islam sama kedudukannya tidak ubahnya seperti gerigi sisir. Mereka memiliki persamaan dalam hak dan kewajiban.⁸¹

Pelaksanaan pemilihan pemimpin umat Islam tidak harus terikat pada ketentuan-ketentuan lama, apalagi jika ketentuan tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi sosial masyarakat Islam saat ini. Kewajiban mengangkat pemimpin adalah kewajiban bagi seluruh Umat Islam. Kewajiban mengangkat pemimpin ini, menurut Al-Jurjani bahwa “ mengangkat pemimpin adalah salah satu dari sebesar-besar maksud dan sempurnanya kemaslahatan”.⁸²

Itulah sistem yang telah dianjurkan para khalaf dalam pengangkatan kholifah tidak ada lain kecuali harus mengikuti mereka. Sedikit saja melenceng dari jalan tersebut akan menimbulkan kesengsaraan dan kebangkrutan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 63 :

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا

Artinya : “Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya disisi Allah". Dan tahukah kamu (hai

⁸⁰ Ibid, h. 232

⁸¹ Ibid, h. 233

⁸² Said Hawwa, *Al-Islam, Jilid 1, Al-I'thisom* (Jakarta : Cahaya Ummat, 2001), h. 563

*Muhammad), boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya.*⁸³

Al-Ghazali menguatkan dengan pendapat bahwa :

“Ketentraman dunia dan keamanan jiwa dan harta tidak tercapai kecuali dengan adanya pemimpinnya yang ditaati. Oleh karena itu “agama dan pemimpin adalah saudara kembar” atau agama adalah sendi dan pemimpin adalah pengawalinya, sesuatu yang tidak ada sendi akan hancur dan sesuatu yang tidak ada pengawalinya akan sia-sia”.⁸⁴

Dan lebih di tegakan lagi oleh Ibnu Khaldun, bahwa :

“Mengangkat pemimpin adalah wajib. Telah diketahui wajibnya pada *syura* dan *ijma* sahabat dan *tabi'in*. Mengingat bahwa para sahabat bersegera membait Abu Bakar setelah Rasulullah Saw wafat dan menyerahkan urusan masyarakat kepadanya. Demukianlah pula pada tiap-tiap masa sesudah itu tak pernah masyarakat dibiarkan dalam keadaan tak berpemimpin. Semuanya merupakan *Ijma* yang menunjukkan bahwa kewajiban adanya pemimpin.⁸⁵

Sejarah dalam Islam mengatakan pada proses pengangkatan *Khalifaur Rasyidin*, bahwa semua dilaksanakan dengan cara yang sederhana dan penuh dengan nuansa kebersamaan, seperti pada saat pengangkatan Abu Bakar di Balai Saqifah, yang dilaksanakan hanya dengan *bai'at* dengan terlebih dahulu mengangkat tangan Abu Bakar.⁸⁶ Tanpa iringan dengan kemeriahan yang berlebihan, yang menunjukkan keadaan adanya perbedaan antara pemimpin denganarganya. Hal ini

⁸³*Ibid*, h. 340

⁸⁴Yaskhsyallah Mansur, *Jama'ah Muslim: Penindasan Terhadap Islam dan Muslim, sudah saatnya Muslim bersatu di bawah Hittah ke Nabian* (Bogor : Al-Fattah Press, 2005), h. 5

⁸⁵*Ibid*

⁸⁶Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin* (Jakarta : Bulan Bintang , 1979), h. 19

juga dilakukan oleh kaum muslimin sampai pada proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib.

Istilah *bai'at* berasal dari kata *ba'a* yang berarti “menjual”. *bai'at* mengandung makna perjanjian ; janji setia atau saling berjanji setia. Dalam pelaksanaan *bai'at* selalu melibatkan kedua belah pihak secara suka rela. Maka *bai'at* secara istilah adalah ungkapan perjanjian antara kedua belah pihak yang seakan-akan salah satu pihaknya menjual apa yang dimilikinya dan menyerahkan dirinya serta kesetianya kepada pihak kedua secara ikhlas segala urusan.⁸⁷

Pengertian *bai'at* tersebut mirip dengan teori “kontrak sosial” dalam ilmu politik. Teori ini menyatakan, seseorang atau sekelompok orang menyerahkan hak kekuasaan dirinya kepada orang yang telah disepakati sebagai pemimpin.⁸⁸ Menurut Ibnu Khaldun, *bai'at* adalah perjanjian atas dasar kesetiaan, bahwa orang yang ber *bai'at* menerima terpilih dirinya menjadi pemimpin dan sanggup melaksanakan tugasnya, sementara menurut Abu Zahroh, *bai'at* merupakan syarat yang disepakati mayoritas umat muslim.⁸⁹

Bai'at bukan hanya sebatas ucapan lisan tanpa makna, lantas sesudahnya tergugurkan kewajiban dan dosa, tetapi *bai'at* merupakan bentuk pengakuan diri untuk *istiqomah* dan berketetapan hati untuk selalu berpegang teguh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah makna *bai'at* sesungguhnya yang harus terpatrit dalam aqidah diri manusia-manusia beriman.

Dari penjelasan di atas, menurut penulis bahwa sistem pengangkatan pemimpin dalam Islam secara garis besar terdapat dua sistem. Pertama dengan cara pemilihan langsung, seperti pada proses terpilihnya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, dan kedua dengan cara tidak langsung atau dengan

⁸⁷Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1999), h. 72

⁸⁸*Ibid*, h. 73

⁸⁹*Ibid*, h. 74

perwakilan, seperti pada proses terpilihnya Umar bin Khatab dan Usman bin Affan. Sementara keabsahan dengan cara *bai'at*. Karena *bai'at* adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak dan perjanjian dengan Allah SWT.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA (PERATIN) PEKON WAY JAMBU LABUHAN

A. Gambaran Umum Pekon Way Jambu Labuhan

1. Sejarah Pekon Way Jambu Labuhan

Sebelum pekon Way Jambu Labuhan terbentuk, daerah ini semula dihuni dan meliputi masyarakat yang berada diwilayah sebelah utara berbatasan dengan pekon Biha, sebelah timur berbatasan dengan persawahan, sebelah selatan berbatasan dengan pekon Marang, dan disebelah barat berbatasan dengan laut lepas. Sesuai dengan perkembangan wilayah, sebagian penduduk pekon Way Jambu Labuhan kemudian berpindah ke daerah Marang dan juga Sukarame.

Nama Pekon Way Jambu sudah ada sejak tahun 1830-an, namun sebelumnya Pekon Way Jambu bernama Bandar Dalam. Pada zaman itu wilayah Pekon Way Jambu sangat luas+ 3.00 hektar. Pekon Way Jambu sendiri dibagi menjadi 6 (enam) pemangku yang dipimpin oleh kepala pemangku, yaitu: 1) Pemangku 1 Dusun 1, 2) Pemangku 2 Dusun II, 3) Pemangku 3 Dusun III, 4) Pemangku 4 Dusun IV, 5) Pemangku 5 Dusun V, 6) Pemangku 6 Dusun VI

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat didaerah ini terhadap makanan, maka semua warga memanfaatkan jambu yang besar. Dari cerita jambu besar itu selalu dimakan dan dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhannya, Dinamakan way

jambu karena jambu tersebut setiap tahun semakin banyak ditanam dan dilestarikan oleh banyak masyarakat.

Tahun terus berjalan, pada tahun 1950 dibawah pimpinan bapak M.Afif didirikan suatu pekon yang memisahkan dari pekon Bandar Dalam menjadi pekon Way Jambu Labuhan.yang namanya diambil dari nama Bandar Jaya.

Berdasarkan sejarah pemerintahan, sudah memiliki pemimpin sejak tahun 1950, yang dipimpin seorang Kepala Desa bernama Bapak M. Afif, hingga peratin yang dipimpin Suryadi 2010 hingga 2016.

Ada pun sejarah pemerintahan tersebut yakni:

Tabel 1.Nama-Nama yang pernah menjabat Kepala Desa Pekon Way jambu Labuhan

NO	NAMA PEJABAT PERATIN	TAHUN MEMERINTAH
1	M.AFIF	1950-1963
2	ZAILI BAKRI	1963-1992
3	ZAINUL ABIDIN	1992-1997
4	EDI SETIAWAN	1997-2002
5	ARIF SANTOSO	2002-2010
6	SURYADI	2010-2016

Sumber: Data Umum Pekon Way Jambu Labuhan Tahun 2010

2. Sejarah Pembangunan Pekon

Sejak berdiri pada tahun 1950 hingga 2010, ada beberapa program atau proyek pembangunan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, ADP, atau swadaya masyarakat.

3. Kondisi Geografis

Pekon Way Jambu Labuhan terletak pinggir pantai dan berada didaerah datar dengan ketinggian di atas permukaan laut rata-rata 100+-m. Ada pun luas wilayah Pekon Way Jambu Labuhan mencapai +_3.000ha.

Tata Guna Tanah

Tabel 2.Tata Guna Tanah Pekon Way Jambu Labuhan

NO	Tata Guna Tanah	Luas
1	Luas Permukiman	43 ha/m2
2	Luas Persawahan	1.90 ha/m2
3	Luas Perkebunan	1.40 ha/m2
4	Luas Kuburan	2 ha/m2
5	Luas Perladangangan	814 ha/m2
6	Luas Taman	0 ha/m2
7	Perkantoran	0 ha/m2
	Total Luas	3.0337 ha /m2

Sumber : Data Umum Pekon Way Jambu Labuhan Tahun 2010

Penduduk Pekon Way Jambu Labuhan pada umumnya penduduk pendatang yang tersebar di 6 pemangku, yakni

pemangku Kota Raja, pemangku labuhan 1, Pemangku labuhan 2, Pemangku labuhan 3, Pemangku Sukarame, Pemangku Sumber Sari pemangku tersebut berada di Pekon Way Jambu Labuhan.

- Sebelah Utara berbatasan dengan pekon Biha
- Sebelah Timur berbatasan dengan persawahan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pekon Marang
- Sebelah Barat berbatasan dengan laut lepas

4. Kondisi Perekonomian

Jumlah penduduk Pekon Way Jambu Labuhan sebanyak +_ 1.593 jiwa sebagaimana potensi yang dimiliki penduduk Pekon Way Jambu Labuhan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan sebagian kecil peternakan dan lainya.

Tabel 3. Jumlah penduduk Pekon Way Jambu Labuhan

NO	URAIAN	Jumlah(Orang/KK)
1	Penduduk/Jiwa	1.593 orang (358 kk)
2	Laki-laki	838
3	Perempuan	755

Sumber : Data Umum Pekon Way Jambu Labuhan Tahun 2010

Tabel 4. Mata Pencarian Penduduk Pekon Way Jambu Labuhan

NO	Mata Pencarian	Jumlah (Orang)
1	Petani	1.025
2	Peternakan	25

3	Pedagang	23
4	Penjahit	15
5	Pegawai Negeri Sipil	2
6	Perangkat Pekon	12
7	Pengrajin	

Sumber : Data Umum Pekon Way Jambu Labuhan Tahun 2010

5. Kondisi Sosial Budaya

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Penduduk Pekon Way Jambu Labuhan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SD	210
2	Tamat SD/ sederajat	529
3	SLTP	458
4	SLTA/SMA	359
5	S-1 ke atas	37

Sumber : Data Umum Pekon Way Jambu Labuhan Tahun 2010

6. Kondisi Sarana dan Prasarana

Pekon Way Jambu Labuhan memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana yang dibidang pendidikan, ke agamaan, dan saranaa umum lainnya.

Tabel 6. Sarana dan Prasarana Pekon Way Jambu Labuhan

NO	Jenis sarana dan prasarana pekon	Jumlah	Keterangan
1	Balai Pekon	1	Rusak
2	Balai SDN	1	Baik
3	Masjid	1	Baik
4	Musholla	1	Baik
5	Pasar Pekon	1	Baik
6	Poskamling	4	Baik
7	Jembatan	2	Baik

Sumber : Data Umum Pekon Way Jambu Labuhan Tahun 2010

B. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Desa (Peratin) Pekon Way Jambu Labuhan

Dasar hukum dalam pemerintahan desa yaitu sub sistem dari pada sistem pemerintahan daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 disebutkan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah atas dan bawah, dengan bentuk susunan pemerintahanya ditetapkan dengan undang-undang, serta memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, hak-hak usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Dalam penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa karena Negara Indonesia adalah suatu *eendheidsstaat* maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah didalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga, daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, dan akan dibagi pula dalam daerah yang kecil dan wilayah administratif.⁹⁰

⁹⁰M.R.Khairul Muluk, *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah* (Sebutan kajian dalam pendekatan berpikir sistem), (Malang : Bayu Media Publishing, 2007).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang pemilihan kepala desa juga menjadi dasar hukum pemerintahan desa, terutama dalam hubungannya dengan pemilihan kepala desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. Dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa, melaksanakan dari Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 yang membentuk kewenangan desa, kewenangan lokal desa, lama jabatan kepala desa, asal usul Kepala Desa.

Selain peraturan di atas, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemilihan Kepala Desa karena itu diatur secara tersendiri dalam Peraturan Daerah (PERDA). Wilayah-wilayah kabupaten disusun secara vertikal yang merupakan lingkungan kerja perangkat pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di daerah. Pembentukan wilayah-wilayah dalam susunan vertikal adalah meningkatkan pengendalian dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.⁹¹

⁹¹Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa* (Jakarta : PT Bina Aksara, 1981), h. 11

Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi disebut daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah yang dalam Undang-undang dikenal adanya daerah tingkat atas dan bawah. Sedangkan wilayah yang dibentuk berdasarkan asas dekosentralisasi disebut wilayah administratif yang dalam undang-undang ini disebut wilayah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Peratin). Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis pemilihan peratin di Kabupaten Pesisir Barat.

Kepala Desa dipilih dari calon kepala desa terpilih yang ditetapkan oleh Badan Himpunan Pemekonan (BHP) Dan disahkan oleh bupati. Hal ini menunjukkan bahwa pengesahan oleh Bupati hanya bersifat administratif sedangkan calon terpilih kepala desa sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dengan dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan. Kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat desa melalui Badan Himpunan Pemekonan(BHP). Dalam mewujudkan demokrasi didesa dibentuklah badan Himpunan Pemekonan (BHP) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan belanja desa serta keputusan kepala desa.

Dalam model ini jelas bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia menghendaki penyelenggaraan pemerintah daerah yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Partisipasi menjadi konsep penting karena masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah.⁹²

⁹²*Ibid*, h. 3

Pemilihan kepala Desa karena itu diatur secara tersendiri dalam peraturan Daerah. Wilayah-wilayah kabupaten disusun secara vertikal yang merupakan lingkungan kerja perangkat pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di daerah. Pembentukan wilayah-wilayah dalam susunan vertikal adalah meningkatkan pengendalian dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.⁹³

Dalam konteks penelitian lapangan mengenai pemilihan kepala desa dalam skripsi ini, dasar hukumnya yang dipakai adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan/pelantikan dan pemberhentian kepala desa.

C. Sistem Pemilihan Kepala Desa (Peratin) Pekon Way Jambu Labuhan

Menurut Mad Herzan tokoh masyarakat (agama, adat) Pekon Way Jambu Labuhan sistem pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan Undang-undang maupun hukum Islam yaitu dengan memusyawarahkan terlebih dahulu calon sebelum dilakukannya pemilihan secara langsung oleh seluruh masyarakat di desa.⁹⁴

1. Sistem pemilihan kepala desa

Menurut Zul Bahri sebagai (Ketua Panitia Pelaksana kepala desa), Kepala Desa dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala desa (pilkades) oleh penduduk desa. Usia minimal kepala desa adalah 25 tahun, dan ia harus berpendidikan paling rendah SLTP, dan termasuk penduduk desa setempat. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan, yang dibentuk BPD, dan

⁹³*Ibid*, h. 5

⁹⁴Mad Herzan, *Tokoh Masyarakat (Agama, Adat), Pekon Way Jambu Labuhan*, Wawancara Prasurver, Tanggal 1 Januari 2017

anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.⁹⁵

2. Tahapan pemilihan kepala desa

Ada beberapa tahapan dalam pemilihan kepala desa di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat menurut Zul Bahri sebagai ketua panitia pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

1) Pembentukan Panitia Pemilihan

Menurut Zul Bahri sebagai Ketua Panitia Pelaksana (Pemilihan Kepala Desa), Pembentukan panitia pemilihan kepala desa ini dibentuk oleh BPD yang dihadiri oleh Badan Himpunan Pemekonan/ Desa (BHP), Tokoh adat, Tokoh masyarakat, dan perangkat yang lainnya. Pembentukan panitia tersebut di tulis dalam berita acara mumpakat yang ditanda tangani oleh ketua BHP. Adapun panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk terdiri dari ketua pemilihan, sekretaris dan anggota. Apa bila masa jabatan kepala desa sudah habis dan anggota BHP belum membentuk panitia pemilihan maka camat yang akan membentuk panitia pemilihan kepala desa dengan menghadirkan BHP dan perangkat pekon/desa.⁹⁶

2) Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Bakal Calon

Menurut Zul Bahri sebagai Panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon tata cara sebagai berikut :

⁹⁵Zul Bahri, *Ketua Panitia Pelaksana, Pekon Way Jambu Labuhan*, Wawancara Prasurver, Tanggal 1 Januari 2017

⁹⁶Zul Bahri, *Ketua Panitia Pelaksana, Pekon Way Jambu Labuhan*, Wawancara Prasurver, Tanggal 1 Januari 2017

- (a) Panitia pemilihan mengumumkan secara terbuka tentang adanya pemilihan kepala desa 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan dengan cara mengumpulkan berkas.
- (b) Penjaringan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak panitia mengumumkan penjaringan bakal calon
- (c) Ketua panitia pemilihan menandatangani berita acara penjaringan bakal calon

Setelah panitia memilih kepala desa melakukan hal tersebut maka panitia menyaring bakal calon yang memenuhi syarat.

3. Pencalonan Kepala Desa

Menurut Irsanuddin sebagai warga desa setempat pencalonan Kepala desa, panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan tata cara penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa. Permohonan kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui panitia pemilihan Kepala Desa dilampiri persyaratan.⁹⁷

4. Kampanye

Menurut Merah Bangsawan sebagai kepala desa terpilih. Kampanye dalam sistem demokrasi eloktoral merupakan sebuah fase yang sangat penting dibelahan bumi mana pun didunia ini sepanjang suatu negara penyelenggara pemilu tersebut menganut sistem demokrasi. Kampanye

⁹⁷ Irsanuddin, *Warga desa, Pekon Way Jambu Labuhan*, Wawancara Prasurver, Tanggal 1 Januari 2017

politik selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum.⁹⁸

Kampanye politik adalah sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemimpin.⁹⁹ Idealnya, sebuah kampanye yang baik itu kampanye yang menginformasikan keunggulan yang dimiliki partai atau tokoh yang menjadi kontestan dalam pemilu tersebut serta mampu memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

Pemilihan Kepala Desa dipilih dari calon kepala desa terpilih ditetapkan oleh badan perwakilan desa dan disahkan oleh Bupati. Hal ini menunjukkan bahwa pengesahan oleh bupati hanya bersifat administratif sedangkan calon terpilih kepala desa sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dengan dijiwai oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan.¹⁰⁰

Tahapan-tahapan pemilihan kepala desa dimulai dari tahapan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, tahapan pencalonan hingga proses pemungutan suara. Peneliti juga ingin meneliti permasalahan dan konflik dalam masyarakat desa yang terjadi dalam proses pemilihan kepala desa tersebut. Penelitian permasalahan tersebut dengan meneliti kepala desa mulai tahap pencalonan hingga tahap pemungutan suara dan meneliti tahapan-tahapan pemilihan

⁹⁸ Merah Bangsawan, *Kepala Desa, Pekon Way Jambu Labuhan*, Wawancara Prasurver, Tanggal 1 Januari 2017

⁹⁹Riawan Tjandara, Menakar efek domino kompanye hitam, artikel, <http://naional.sindonews.com/read/870788/18/menakar-efek-domino-kompanye-hitam-1402033021> diakses 10 Februari, 2016

¹⁰⁰ Taliziduhu Ndraha, *Op. Cit*, h. 35

kepala desa yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah melalui peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 04 tahun 2006 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan/ pelantikan dan pemberhentian kepala desa.

5. Pemilihan Kepala Desa

Menurut Zul Bahri sebagai ketua panitia pelaksanaan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia, pelaksanaan pemilihan kepala desa harus bersifat langsung, bebas, jujur dan adil. Pemilihan dilaksanakan pada tanggal, hari, dan tempat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.¹⁰¹

6. Penetapan dan pengesahan calon terpilih

Menurut Zul Bahri Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun dan membacakan berita acara pemilihan. Berita acara pemilihan ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan, saksi-saksi dan seluruh calon kepala desa. Ketua panitia mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan syahnya pemilihan calon kepala desa.¹⁰²

7. Pelantikan Kepala Desa terpilih

Menurut Zul Bahri sebagai ketua panitia pelaksana (pemilihan kepala desa), paling lambat 15 hari (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati tentang

¹⁰¹Zul Bahri, *Ketua Panitia Pelaksana,, Pekon Way Jambu Labuhan*, Wawancara Prasurver, Tanggal 1 Januari 2017

¹⁰²Zul Bahri, *Ketua Panitia Pelaksana, Pekon Way Jambu Labuhan*, Wawancara Prasurver, Tanggal 1 Januari 2017

pengesahan kepala desa terpilih, Kepala Desa terpilih segera dilantik oleh Bupati sesuai dengan petunjuk.¹⁰³

Menurut Zul Bahri (Panitia pelaksana Pekon Way Jambu Labuhan) sistem pemilihan Kepala Desa (Peratin) yaitu sebagai berikut : Landasan Hukum Pilkades, Berakhirnya masa jabatan Kepala Desa (Persiapan pemilihan Kepala Desa), Pembentukan Panitia Pemilihan, Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Bakal Calon, Pencalonan Kepala Desa, Kampanye, Pemilihan Kepala Desa, Penetapan dan pengesahan calon terpilih, Pelantikan Kepala Desa terpilih.¹⁰⁴

8. Berakhirnya masa jabatan Kepala Desa (Persiapan Pemilihan Kepala Desa)

Menurut Mad Herzan sebagai Tokoh Masyarakat. Badan Musyawarah Desa (BMD) memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Dalam hal ini BPD memberikan peringatan berupa surat tentang akan berakhirnya masa jabatan kepala desa. BPD memperoses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.¹⁰⁵

¹⁰³Zul Bahri, *Ketua Panitia Pelaksana, Pekon Way Jambu Labuhan*, Wawancara Prasurver, Tanggal 1 Januari 2017

¹⁰⁴Zul Bahri, *Ketua Panitia Pelaksana, Pekon Way Jambu Labuhan*, Wawancara Prasurvey, Tanggal 1 Januari 2017

¹⁰⁵Mad Herzan, *Tokoh Masyarakat (Agama, Adat), Pekon Way Jambu Labuhan*, Wawancara Prasurver, Tanggal 1 Januari 2017

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA (PERATIN) DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAN ISLAM

A. Proses Pelaksanaan Pilkades Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat

Poin-poin penting yang menjadi objek analisa adalah yang berkaitan dengan proses pemilihan Kepala Desa, yang meliputi :

1. Proses Penjaringan Calon Kepala Desa

Menurut Zul Bahri sebagai Ketua Panitia Pelaksana, dalam proses penyaringan bakal calon, ditentukan syarat-syarat diantaranya: Mendapatkan dukungan minimal 200 orang dibuktikan dengan foto copy kartu tanda penduduk dan surat keterangan dukungan, memiliki ijazah serendah-rendahnya SLTP atau sederajat, umur minimal 25 tahun dan maksimal 50 tahun dan surat keterangan berbadan sehat dari dokter serta surat keterangan tidak terlibat dalam organisasi terlarang.

Mengenai persyaratan semacam ini, dalam tinjauan Islam, jelas sangat berbeda, persyaratan tersebut lebih banyak ke aspek administrasi bukan pada kemampuan seseorang dalam memimpin. Selain itu persyaratan penjaringan bakal calon mengabaikan prinsip-prinsip akhlak sebagai seorang pemimpin, dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa syarat-syarat menjadi calon pemimpin adalah yang berdasarkan pada wahyu ilahi, diantaranya adalah *amanah*, yang selalu bersikap tanggung jawab dan tidak pernah mengingkari janji dan suka berkhianat, *fathonah* yaitu harus memiliki kecerdasan, memiliki wawasan keilmuan, keterampilan memimpin, bijaksana, *sidiq* yakni selalu bersikap benar jujur dan dapat dipercaya serta *tabligh* yaitu memiliki kecenderungan untuk

selalu mengajak, menyebarkan dan menyampaikan ajaran Islam.

Dibandingkan dengan kriteria pemimpin dalam Islam nampaknya persyaratan yang diajukan dalam pemilihan kepala desa tidak sesuai dengan ajaran Islam, ciri khas dari keadaan ini adalah diabaikannya prinsip keterampilan dan akhlak seorang pemimpin.

Dari tahapan penjaringan bakal calon pilkades di desa Way Jambu Labuhan hanya tiga orang yang memenuhi syarat, yaitu, Merah Bangsawan, Suryadi, Tumo. Sedangkan yang lain dianggap tidak memenuhi syarat karena tidak melengkapi berkas persyaratan yang diajukan panitia. Dengan demikian hanya tiga orang inilah yang diajukan menjadi calon pilkades di desa Way Jambu Labuhan. Tahapan selanjutnya adalah penentuan nama-nama calon pilkades di desa Way Jambu Labuhan. Pada tahapan ini sekaligus penentuan nomor urut.

Tahapan penjaringan ini menghasilkan tiga orang calon yang dianggap layak sebagai peserta pilkades, dalam tinjauan hukum Islam cara seperti termasuk dalam sistem formatur artinya sesuai dengan ajaran Islam. Menurut sejarah pemilihan Khalifah prinsip pemilihan pemimpin yang pertama dilakukan adalah melalui jalan formatur, yakni pemilihan secara seleksi orang-orang yang dianggap mampu memimpin. Dalam kaitan ini Nampak sebagai calon sepeninggalan Rasulullah Saw adalah Abu Bakar, Umar dan Ali.

Setelah proses ini selesai barulah pemilihan diserahkan kepada seluruh umat Islam untuk menentukan sendiri siapa pemimpinnya. Dengan demikian dalam Islam prinsip pemilihan langsung secara tersirat dapat dipahami sebagai bagian dari demokrasi hal ini sesungguhnya sama dengan sistem pemilihan di Indonesia, calon kepala desa misalnya dipilih oleh panitia

husus melalui berbagai tahapan yang pada akhirnya rakyatlah yang menentukan sendiri.

2. Proses Kampanye Pilkades

Menurut Merah Bangsa Kepala Desa terpilih Sebagaimana layaknya dalam pemilihan kepala daerah, proses pemilihan kepala desa menggunakan kampanye sebagai sarana untuk menjaring suara pemilih. Diantara bentuk-bentuk kampanye yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk merekrut suara adalah : pertemuan terbatas, tatap muka dan berdialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alas serta pemasangan peragaf ditempat umum, Rapat Umum.

Ketegangan-ketegangan yang terjadi pada masyarakat desa umumnya disebabkan kesalah pahaman dari pemilih sendiri terutama pada saat kampanye. Menurut perspektif Islam, masalah kampanye memang tidak diatur secara gamblang hanya saja yang menjadi titik tekan adalah bahwa apapun bentuk setiap kecurangan yang dapat memecah belah persatuan umat merupakan pelanggaran atas hukum-hukum Allah. Kondisi semacam ini jelas akan berpengaruh terhadap hasil pemilihan, jika tidak sesuai dengan aturan maka sebagian masyarakat akan bersikap tidak royal yang berujung pada ketidaktaatan pada pemimpin.

Menurut Pandangan Islam ketegangan dimasyarakat yang dapat meruntuhkan persatuan dan kesatuan umat Islam, apalagi sampai mengobarkan permusuhan dan kebencian jelas-jelas sangat dilarang sebaliknya dalam pandangan Islam suksesi menjadi sunnatullah akan tetapi dilandasi dengan semangat kebersamaan dan membangun untuk kemakmuran bersama.

Konflik sosial jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang lebih mengutamakan persaudaraan antar

sesama muslim dan senantiasa taat kepada pemimpin dalam perkara yang hak, dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah SWT memperjelas perintah agar orang-orang mukmin senantiasa taat kepada pemimpin.

3. Keterlambatan waktu pelaksanaan pilkades

Menurut Mad Herzan Tokoh Masyarakat Pekon Way Jambu Labuhan. Akibat dari keterlambatannya pelaksanaan pilkades ini menimbulkan prasangka buruk dari masyarakat terutama dari pendukung calon pilkades yang baru, maksudnya anggapan masyarakat bahwa keterlambatan tersebut disengaja untuk menghambat majunya calon yang baru dan sebagai alasan pejabat lama untuk menggalang kekuatan dan melobi para pemerintahan di Kabupaten. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan salah seorang tokoh di desa Way Jambu Labuhan yang menganggap lambatnya pelaksanaan pilkades di desa Way Jambu Labuhan disebabkan banyak pihak yang ingin meraih keuntungan, terutama dari pejabat lama agar dirinya lebih siap dalam menghadapi pemilihan yang berlangsung setelah era reformasi. Pejabat lama nampaknya khawatir disebabkan setelah reformasi masyarakat desa mulai berani menunaikan hak pilihnya tanpa takut ada intervensi pihak-pihak lain. Keterangan ini sebenarnya bertentangan dengan pengakuan dari salah seorang pejabat lama yang mengatakan bahwa keterlambatan pelaksanaan pilkades disebabkan masih banyaknya kerja yang harus diselesaikan oleh pejabat lama.

Dari kondisi ini jelas memunculkan konflik sosial dilihat dari segi harmonisasi hubungan antar masyarakat dan berakibat pada runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pejabat lama. Dalam kaitan ini proses pemilihan yang terlibat jelas akan menimbulkan pro kontra terhadap dua pendukung calon, dimana pendukung dari pejabat lama jelas memahami keterlambatan ini, akan tetapi sebaliknya sulit diterima oleh

pihak pendukung calon baru yang akan bersaing dalam pilkades di desa Way Jambu Labuhan.

Lahirnya buruk sangka dalam konsep Islam jelas tidak dibenarkan dimasyarakat akan terjadi saling gunjing, ghibah dan saling berperasangka buruk. Jika didalam masyarakat sudah terjadi kondisi semacam ini maka konflik fisik akan terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, disinilah pentingnya pengelolaan masyarakat yang rukun, aman dan tentram, ketentraman akan menjamin berlangsungnya kaidah-kaidah Islam dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara.

Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 : hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi maha penyanyang. Ayat ini dengan tegas menjaskan sesama muslim apalagi dalam salah satu wilayah tidak boleh terjadi saling menggunjing dan mencari kesalahan orang lain. Jika melaksanakan perbuatan-perbuatan tersebut dipastikan umat Islam akan tercerai dan saling bermusushan.

Berdasarkan analisis sebagaimana diuraikan di atas dapat dipahami bahwa dalam proses pemilihan kepala desa Way Jambu Labuhan, dalam perspektif Islam proses penyaringan bakal calon yang tidak mengutamakan keterampilan, kemampuan dan akhlak seorang pemimpin bertentangan dengan syariat Islam. Adanya keterlambatan pelaksanaan pilkades sehingga menimbulkan buruk sangka dimasyarakat tidak sesuai dengan ajaran Islam, serta proses kampanye

pilkades yang saling menjelek-jelekan dan menggunakan cara kotor bertentang dalam prinsip demokrasi dalam Islam. Adapun sistem pilkades yang menggunakan cara penjarangan calon sesuai dengan sistem formatur sesuai dengan ajaran Islam yang menggunakan formatur dalam pemilihan seorang pemimpin.

B. Proses Pemilihan Kepala Desa Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat ditinjau dalam Hukum Ketatanegaraan Islam

Proses pemilihan Kepala Desa Pekon tentu saja merupakan proses yang tidak perlu dipermasalahkan kedudukannya sejauh dalam pelaksanaannya tidak terdapat masalah-masalah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau terjadinya penyimpangan. Sebab, proses pemilihan Kepala Desa adalah proses memilih seorang pemimpin yang nantinya akan memimpin didesa tersebut menuju yang lebih baik lagi. Memilih pemimpin adalah kewajiban bagi suatu masyarakat, juga dalam masyarakat Islam.

Pemilihan Kepala Desa diberbagai daerah di Indonesia memang masih perlu dikaji, karena dalam proses pemilihan kepala desa cenderung melakukan segala hal demi untuk menang dalam pemilihan kepala desa. Seperti hanya di Pekon Way Jambu Labuhan Kecamatan Pesisir Selatan, dimana dalam perebutan kepala desa banyak hal yang dilakukan oleh tim sukses kepala desa. Perebutan tersebut karena masyarakat di Pekon masih dalam bentuk pemerintahan kecil jadi sangat rawan terjadi konflik antar saudara dan adat setempat. Perebutan tersebut seperti memaksa saudara untuk mendukung dan memilih calon kepala desa dan begitu juga dengan tarik menarik dari anggota adat istiadat. Pada taik menarik suara seperti ini sangat rawan terjadinya perselisihan hingga menimbulkan konflik berkepanjangan. Sepanjang sejah Islam

dalam hal pengangkatan pemimpin selalu mengacu pada pengangkatan khulafa arasyidin. Pada masa empat sahabat Rasulullah Saw. Tersebut tidak ada model perebutan suara seperti yang ada pada sistem demokrasi. Abu Bakar ra. Umar ra. Ustman ra. Ali ra. Adalah contoh bagi umat muslim dalam mengangkat pemimpin dimana mereka tidak ada yang harus untuk meraih kekuasaan.

Islam memang tidak memberikan petunjuk sistem apa yang dipakai untuk mengangkat pemimpin karena melihat dari sejarah pengangkatan *khulafa arasyidin* memang berbeda-beda cara pengangkatannya. Satu kata kunci pengangkatan khulafa arasyidin yaitu menyalahi dan tidak melanggar syariat Islam. Setidaknya ada dua metode pengangkatan *Khulafa Arasyidin* :

1. Baiat *In'iqad*, yakni baiat yang menunjukkan legalitas orang yang dibaiat sebagai khalifah, pemilik kekuasaan, berhak ditaati, ditolong, dan diikuti.
2. Baiat 'Ammah/Baiat *Tha'ah*, yaitu baiat kaum muslim terhadap khalifah terpilih dengan memberikan ketaatan kepadanya. Baiat *tha'ah* bukanlah untuk mengangkat khalifah, karena khalifah sudah ada.

Memang jika kita menengok ke teori politik barat dengan sistem demokrasi, teori tersebut tidak ada penguat tentang peran penting sang maha pencipta dalam pemilihan pemimpin, walaupun ada, tetapi tidak menjadi pokok utama dalam sistem tersebut. Teori semacam ini akan mudahnya terjadi masalah-masalah social dan politik seperti perebutan kekuasaan, saling menjelekan calon pemimpin dan lebih dari itu kita melihat pertumpahan darah. Sedangkan dalam paradigma pra modern, hubungan agama dan politik dalam Islam mengandung makna simbiosis. Simbiosis ini menunjukkan saling pengertian dan hubungan timbale balik antar agama dan politik, atau masing-masing saling membutuhkan agar tetap eksis. Hubungan

Simbiosis yang dimaksud dengan cara saling membutuhkan tersebut karena politik butuh dengan norma-norma dan nilai-nilai keimanan agar tidak terjadi permasalahan dan konflik yang dapat merugikan masyarakat.

Salah satu bentuk pemilihan umum adalah pemilihan kepala desa. Pemilihan Kepala desa Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan diperkuat oleh peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2016 Tentang pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa tersebut berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dengan pemilihan kepala desa secara langsung akan terciptanya demokrasi sampai pada tingkat yang paling bawah (desa).

Secara umum pemilihan kepala desa baik dari peraturan pemerintah maupun dalam agama Islam adalah tujuan sama-sama untuk memilih pemimpin yang akan mengayomi masyarakat dan membawa desa kearah yang lebih baik lagi. Namun, bagaimana jika dalam proses pengangkatannya dinodai dengan perebutan kekuasaan, yang pada akhirnya memecah suku, ras dan kekeluargaan.

Hasil observasi lapangan ditemukan desa Way Jambu Labuhan telah melakukan pemilihan kepala desa pada tahun 2016 yang lalu, secara keseluruhan dalam pelaksanaan proses pemilihannya memang sudah mengikuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2016 Tentang tata cara pemilihan, pengangkatan/ pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Hal ini bisa terlihat dari lancarnya proses pemilihan kepala desa tersebut dimulai dari pembentukan panitia sampai pada pemungutan suara. Namun, dalam proses pemilihan tersebut masih terdapat dinamika social

yang berimbas konflik sosial, dinamika sosial tersebut dilakukan oleh tim sukses atau pendukung calon yang terlalu ambisi untuk memenangkan calon yang diusungnya. Dinamika tersebut berupa perebutan masa pemilih hingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan, memutuskan tali silaturahmi sesama saudara.

Melihat proses pemilihan kepala desa di pekon Way Jambu Labuhan memang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam hal ini karena masyarakat Way Jambu Labuhan antusias terhadap pemilihan kepala desa sebagaimana Islam mewajibkan pengangkatan pemimpin dalam suatu komunitas baik Negara maupun organisasi pemerintahan yang paling kecil (desa). Hal yang menarik dalam pemilihan kepala desa Way Jambu Labuhan adalah masalah konflik, dimana hubungan persaudaraan yang sudah lama mereka jalin akan hilang begitu saja hanya karena berlainan pandangan terhadap calon kepala desa.

Kuatnya ikatan tersebut melemahkan ketika bersinggungan dengan pemilihan kepala desa sehingga terpecah belah, seperti nilai-nilai kekeluargaan yang melemah yang tidak sesuai dengan hakekat dari adat Lampung *Khanggom Mufakat* (segala urusan itu diselesaikan dengan musyawarah), yang ditandai dengan adanya persaingan politik yang tidak sehat diantara kedua kebu tersebut.

Dari analisis diatas setidaknya ada 2 (dua) pandangan Islam terhadap pemilihan kepala desa di Way Jambu Labuhan antara lain :

1. Pandangan Islam terhadap pemilihan kepala desa

Imam Abu Hasan Al-Mawardi menjelaskan bahwa mengangkat pemimpin adalah fardu kifayah, artinya yang dituntut untuk menegakan adalah umat semuanya,

jika pemimpin belum tegak umat selalu dituntut kewajiban ini, mereka tidak akan terbebas dari dosa, sebelum tegaknya pemimpin dan apabila pemimpin tidak ada, maka dosanya menjadi tanggungan umat seluruhnya. Hal itu berarti umat telah melakukan maksiat dan melalaikan kewajiban penting yang diperintahkan Allah.

Pekon Way Jambu Labuhan telah melaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun 2016 maka dari itu pekon Way Jambu Labuhan sejalan dengan Islam tentang arti penting ini seorang pemimpin yang akan mengayomi masyarakat untuk masyarakat yang lebih baik. Hal terlihat pada antusias masyarakat desa Way Jambu Labuhan pada pemilihan kepala desa dan peran aktif didalamnya.

Pemilihan pemimpin dalam proses pengangkatan dibentuk *ahlul halli wal 'aqdi* lembaga ini fungsinya untuk mengawal pengangkatan pemimpin. Mengamalkan metode pengangkatan pemimpin dari tahap ketahap lainnya berbeda-beda tergantung dari situasi dan kondisi ditempat tersebut tapi adanya lembaga tersebut tujuannya untuk seleksi bakal calon yang akan maju untuk menjadi pemimpin dan mengawasi jalannya pemilihan tersebut.

Hal senada dengan pemilihan kepala desa di Way Jambu Labuhan, dimana pemilihan tersebut dibentuk panitia pemilihan kepala desa guna untuk mengawal pemilihan kepala desa mulai dari penjurian bakal calon dan seleksi berkas hingga pemungutan suara. Hal ini tujuannya untuk melahirkan pemimpin yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat.

2. Masalah yang terdapat dalam pemilihan kepala desa

Pemilihan kepala desa Way Jambu Labuhan walaupun sesuai dengan metode pengangkatan pemimpin dalam pandangan Islam tetapi bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak ada masalah. Masalah tersebut terjadi karena keinginan yang berlebihan oleh tim sukses calon dan pendukung untuk memenangkan pemilihan kepala desa sehingga melakukan segala cara untuk mendapatkan masa termasuk memaksa saudara untuk memilih calon tertentu.

Proses kampanye di desa Way Jambu Labuhan masih dianggap belum sesuai dalam pandangan Islam karena masih ada perselisihan yang mendorong konflik berkepanjangan. Dalam Islam, ini adalah perbuatan mudharat dan hukumnya haram. Islam adalah agama yang santun, menjunjung tinggi moralitas, agama yang mendamaikan, agama yang membawa kebaikan, agama yang menolak kemudharatan dan menarik kemaslahatan.

Jadi, setiap aktivitas yang mendatangkan kemudharatan seperti bercerai berai maka Islam melarangnya. Sama halnya dengan kampanye yang mendatangkan kemudharatan, aktivitas tersebut bisa dikatakan haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Islam juga menjunjung tinggi demokrasi yang sehat, jika dalam demokrasi terdapat kecurangan atau kelicikan yang dikemas dalam "*black campaign*" sehingga mencederai keadilan dan kebenaran, jelas ia bisa dikatakan haram.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

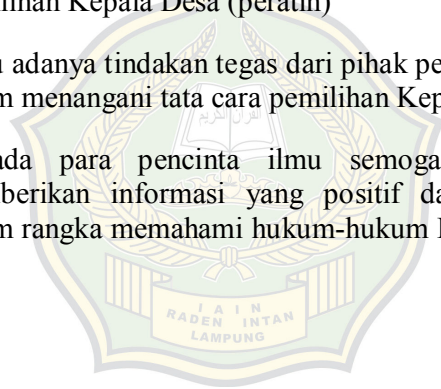
1. Kepala Desa di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala desa (pilkades) oleh penduduk desa. Dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a). Usia minimal kepala desa adalah 25 tahun, b). berpendidikan paling rendah SLTP, dan c). termasuk penduduk desa setempat. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan, yang dibentuk BPD, dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

2. Sistem pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh masyarakat di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat pemilihan Kepala Desa ditinjau dari hukum ketatanegaraan Islam dapat dibenarkan, sebab perintah pemilihan dalam Islam didasarkan pada musyawarah sistem atau model apa yang disepakati masyarakat.

B. Saran-saran

Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis ingin memberikan pesan moral kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Perhatian pemerintah pusat mau pun pemerintahan daerah untuk lebih ditingkatkan lagi untuk mengawasi pemilihan Kepala Desa (peratin)
2. Perlu adanya tindakan tegas dari pihak penegak hukum dalam menangani tata cara pemilihan Kepala Desa.
3. Kepada para pencinta ilmu semoga tulisan ini memberikan informasi yang positif dan konstibusi dalam rangka memahami hukum-hukum Islam.





DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Karim dan Terjemahan (Departemen Agama Republik Indonesia), Bandung : PT. Syamil Cipta Media, tth

Abdul Sattar Abdul Mufis , Sistem Pemerintahan dalam Islam, ter. Tajjudin Pogo, : pustaka Ikadi, Jakarta, 2010

- Ali-Syariati, M. Faiishol Hasanuddin, *Ummah dan imammah*, penerjemah, yapi, Jakarta, 1990
- Al-Ghazali, *At-Tibr al-Mabuk fi Nasihah al—Muluk*, Beirut: Daar Ibn Zaidun, 1987
- Al-Mawardi Imam, *Ahkam Sultonyah*, Qisthi Press, Jakarta, 2015
- Anwar Ahmadi Ahmad, *Prinsip-prinsip Metododologi Research*, Sumbangsi, Jakarta, 1975
- Amru, Pengangkatan Pemimpin Dalam Islam, [Error! Hyperlink reference not valid.](#), diakses 10 februari 2015
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Lapangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Bahtiar Wardi, *Metode Ilmu Dakwah*, Logos cet 1, Jakarta, 1997
- Black Antony, *Pemikiran Politik Islam : Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Penerjemah Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati, Jakarta, 2006
- Dapertemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- F.R.C.Bagley,dalam “*introduction*” *Al-Ghazali views on the chaliphate*” lihat Al-Ghazali’s book of counsel for kings(*Nasihah Al-Muluk*), terjemahan ingris oleh F.R.C .Bagley London: oxford University Press,1964
- Hadi kusuma Hilman, *Pengantar ilmu hukum adat*, Edisi revisi, CV Mandar Maju, Bandung, 2014
- [https:// id. Sitiativa. Wordpress.com](https://id.sitiativa.wordpress.com)
- Indonesia, *Undang-undang Desa Kelurahan dan Kecamatan*,, Fokus Media, Badung, 2014

- Ikbal Muhammad, *Fiqih Siyasah* : konstestualisasi doktrin pPolitik Islam, kencana, Jakarta, 2014
- Ibnu Mujaar Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2008
- Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan apakah Pemimpin Abnormal Itu?*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2003
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, , PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Khaliq Abdul Farid, *Fiqih Politik Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2005
- Mardani, *Hadis Ahkam*, Raja wali pers, Jakarta, 2012
- Monteiro Josef Mario, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016
- M. Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Moeloeng Lexy L, *Metodelogi Penelitian*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001
- M.R.Khairul Muluk, *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah (Sebutan kajian dalam pendekatan berpikir sistem)*, Malang : Bayu Media Publishing, 2007
- Ndraha Taliziduhu , *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, , PT Bina Aksara, Jakarta, 1981
- Nadirsyah, “ *Ketika syura dan wasiat berganti posisi* : Beberapa catatan untuk Ali Syari’ati, dalam M. Deden Ridwan (editor), *Ali Syari’ati : melawan hegemoni barat, Agama, ideology dan dentuman revolusi social perspektif intelektual Indonesia*, , RaunsyanFikr Institue, Yogyakarta , 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

Pasolong Harbani , *Kepemimpinan Birokrasi*, Alfabeta cv, Bandung, 2010

Qayyum Abdul, *Surat-surat Al-Ghazali*, Bandung: Mizan, 1988

R. Eep Saefullah Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Radjab Darsil, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan kedua, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Riawan Tjandara, Menakar efek domino kampanye hitam, artikel, <http://naional.sindonews.com/read/870788/18/menakar-efek-domino-kampanye-hitam-1402033021> diakses 10 Februari, 2016

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, sejarah, dan Pemikiran*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1999

Syarifuddin Amir , *Ushul Fiqih Jilid 1*, cet VI , PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997

Sadzali Munawir , *Islam dan Tata Negara*, “*Ajaran, sejarah dan pemikiran*”, : Universitas Indonesia, Jakarta , 2008